



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KESEHATAN

Jl. Pamenang Nomor 1-C Sukorejo, Ngasem, Kediri, Jawa Timur 64182
Telp. 0354-683756 Email: dinkes@kedirikab.go.id - Website: dinkes.kedirikab.go.id

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2023

KEDIRI
BERBUDAYA



@dinkes.kabkediri



@dinkeskedirikab



Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri





KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya sehingga **Laporan Kinerja Instansi** Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2023 dapat tersusun. Kami sadari sepenuhnya bahwa penyusunan **Laporan Kinerja** Dinas Kesehatan ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena proses pengumpulan dan validasi datanya belum sepenuhnya memanfaatkan sarana teknologi informasi.

Laporan Kinerja disusun sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Informasi yang disajikan dalam **Laporan Kinerja** ini berisi keberhasilan – keberhasilan yang telah dicapai, serta kendala atau kekurangan yang ada. Selain itu, **Laporan Kinerja** ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. **Laporan Kinerja** Dinas Kesehatan Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Secara eksternal, Laporan Kinerja merupakan alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dalam rangka menuju terwujudnya *good governance*. Sedangkan secara internal, Laporan Kinerja merupakan salah satu alat evaluasi untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

Laporan Kinerja Kesehatan Kabupaten Kediri ini disajikan dalam bentuk cetakan, dan *softcopy* serta juga dapat diunduh di website dinkes.kedirikab.go.id sehingga memudahkan para pengguna (masyarakat) untuk mendapatkan publikasi ini.

Akhirnya penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan manfaat bagi peningkatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kediri .

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kediri



dr. AHMAD KHOTIB
Pembina Utama Muda
NIP. 197003242002121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum	2
D. Dasar Hukum	4
E. Sistematika	5
 BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program.....	6
1. Visi	6
2. Tujuan	7
3. Sasaran	8
4. Strategi dan Arah Kebijakan	8
5. Program	10
B. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU)	10
 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Perbandingan Realisasi Kinerja	101
C. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	102
D. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	103
E. Pencapaian Kinerja Anggaran	103
F. Efisiensi Penyerapan Anggaran Dalam Pencapaian Kinerja	104
G. Penggunaan Sumber Daya	105
H. Efisiensi Atsa Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Kinerja	105

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran dan Rekomendasi	106

Lampiran-lampiran

Rencana Strategis SKPD Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran kinerja (PK) Tahun 2023



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri menyusun Perencanaan Strategis untuk masa lima tahun dari tahun 2021 s/d 2026. Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan disusun sesuai dengan kebutuhan Dinas Kesehatan dengan menampung sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri, serta indikator-indikator penunjangnya.

Mengenai asas akuntabilitas, Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten selama Tahun 2023 kepada Bupati. Laporan akuntabilitas ini disusun dalam rangka pelaksanaan Tap MPR Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut di atas.

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara mulai eselon II wajib memberikan laporan Akuntabilitas Kinerjanya.

Adapun secara teknis penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2023. Adapun tujuannya adalah :

- a. Memberikan informasi mengenai Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten selama tahun 2023.
- b. Sebagai bahan evaluasi kinerja serta masukan dalam perencanaan program di Dinas Kesehatan Kabupaten untuk kemudian diharapkan adanya perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten yang lebih baik di masa mendatang
- c. Menjadikan Dinas Kesehatan Kabupaten yang akuntabel sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif dan representatif serta dapat mengakomodir aspirasi masyarakat dan lingkungan
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten.

C. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri dan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang terdiri atas :

1. Bidang Kesehatan Masyarakat

2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. Bidang Pelayanan Kesehatan
4. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Setiap Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi sesuai bidangnya. Sedangkan Sekretaris dibantu 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Penyusunan Program; Sub Bagian Keuangan, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan;
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan pelayanan di bidang Kesehatan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pelayanan di bidang Kesehatan;
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan di bidang Kesehatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan di bidang Kesehatan;
- g. Pembinaan UOBK RSUD dan UPT;
- h. Pelaksanaan administrasi di bidang pelayanan Kesehatan;
- i. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mempunyai struktur organisasi yang terdiri atas :

- Kepala Dinas
- Sekretariat
- Bidang Kesehatan Masyarakat
- Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Bidang Pelayanan Kesehatan
- Bidang Sumber Daya Kesehatan
- UOBK RSUD
- UPT

- Kelompok Jabatan Fungsional

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2023 didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya yang terdiri dari program-program kesehatan seperti tercantum dalam Dokumen Perubahan Anggaran (DPA) Tahun 2023 yang meliputi 5 Program dengan 19 Kegiatan dan 74 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang dan UPT

D. DASAR HUKUM

Sebagai Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja adalah :

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Lembaga Administrasi Negara.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Administrasi Negara.
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara.
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
10. Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

E. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan atas ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja dengan susunan sebagai berikut :

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

Bab I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Rencana Strategis
 - Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program
- B. Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Kinerja Organisasi
- C. Realisasi Anggaran

Bab IV : Penutup

Kesimpulan

Lampiran-Lampiran :

Rencana Starategis Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2023



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategi dan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Masing-masing tugas dan fungsi ini dijabarkan lebih lanjut melalui program Sekretariat, Bidang, Sub Bagian/Seksi dan Fungsional. Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan didasarkan pada kondisi strategi, isu global serta perkembangan terkini serta adanya visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam menyusun rencana kerja tahunan Dinas Kesehatan juga memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Sehingga Rencana Kerja Tahunan dapat tersusun secara realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Untuk mendukung pembangunan daerah, Dinas Kesehatan sebagai leading sektor pembangunan bidang kesehatan harus mendukung visi Bupati Kediri yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter-Nasionalis, Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani “***.

Maka rumusan misi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 sebagai pemersatu gerak ,langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen untuk mengarah pada pencapaian kondisi akhir sebanyak 9 misi pembangunan yaitu :

1. Pengembangan sumber daya manusia yang berkarakter nasionalis-religius;
2. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi daerah;
4. Revitalisasi pertanian untuk ketahanan dan swasembada pangan;

5. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah;
6. Optimalisasi kepariwisataan berbasis kearifan lokal
7. Optamilisasi tata kelola lingkungan hidup, sumber daya alam, dan mitigasi bencana;
8. Pengembangan seni budaya, olah raga dan kreativitas pemuda;
9. Perwujudan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Kesehatan sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, sesuai dengan program prioritas daerah yang ke tiga yaitu :

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Program prioritas tersebut sudah selaras dengan program dari pusat dan program prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur, program kerja tersebut adalah peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan, sedangkan rincian programnya adalah peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, meliputi :

- 1) Kepesertaan jaminan kesehatan;
- 2) Penerapan pola hidup sehat bagi keluarga (kecukupan gizi, stunting, wasting, anemia bumil, ODF Open defecation free/ bebas buang air besar sembarangan)
- 3) Keterjangkauan layanan kesehatan; dan
- 4) Menurunnya angka kematian ibu dan bayi.

2. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu

sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Adapun tujuan dari pembangunan kesehatan di Kabupaten Kediri adalah *“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”*. Dari tujuan tersebut terdapat satu indikator tujuan yaitu Indeks Kesehatan (Umur Harapan Hidup).

3. Sasaran

Sasaran strategis Dinas Kesehatan adalah meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan indikator sasaran :

1. Persentase Masyarakat Yang Memiliki Jaminan Kesehatan
2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Terakreditasi Minimal Utama

Tabel : 2.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran

	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing	1. Umur Harapan Hidup	1. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	1. Persentase Masyarakat Yang Memiliki Jaminan Kesehatan
			Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintrah Yang Terakreditasi Minimal Utama

4. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2023, maka ditempuh melalui Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang direncanakan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan

penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengacu kepada bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Adapun strategi yang direncanakan tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan akses layanan kesehatan dengan upaya promotif preventif melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanganan masalah kesehatan.
2. Membangun standarisasi kualitas layanan dan menjamin peningkatan kepuasan masyarakat.

Untuk mewujudkan strategi, tersebut disusun arah kebijakan tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas.
2. Peningkatan jaminan akses layanan kesehatan melalui pelaksanaan program - program kesehatan di fasilitas kesehatan.
3. Pembinaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam kepesertaan jaminan kesehatan.
4. Meningkatkan kompetensi dan ketersediaan SDM bidang kesehatan.

5. Penerapan pola hidup sehat bagi keluarga.
6. Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.
7. Penataan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
8. Peningkatan promosi kesehatan dalam kondisi pandemi.
9. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan.

5. Program

Program yang ditetapkan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

B. PERJANJIAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Setiap sasaran telah ditetapkan sejumlah indikator dan untuk memudahkannya disusunlah Indikator Kinerja Utama (IKU). Rumusan Indikator utama tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berdasarkan Dokumen Perencanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 327.947.380.389,00 dengan 5 program, 21 kegiatan dan 87 sub kegiatan.

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2023 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri tahun 2023 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja. Untuk mengetahui indikator kinerja dan Indikator Kinerja Utama dan rencana tingkat capaian (target) dapat dilihat pada lampiran di bawah ini.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact), Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Tahun ke 1 (2023)				Persentase (%)
							Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1		2		1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan (Umur Harapan Hidup)	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	1.02 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	90%	90%	160.731.348.191	149.215.980.765	92,8%
			Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	1.02 . 01 . 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	158.721.000	135.255.550	85,2%
				1.02 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Rentra, Renja)	2	2	40.711.000	24.816.000	61,0%
				1.02 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan dalam 1 tahun (Lap bulanan, semesteran, tahunan)	15	15	118.010.000	110.439.550	93,6%
				1.02 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	84.151.270.027	80.621.279.724	95,8%
				1.02 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	81.819.051.827	78.482.300.098	95,9%
				1.02 . 01 . 2.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan administrasi (penerima honor)	95	95	1.368.656.000	1.291.076.180	94,3%
				1.02 . 01 . 2.02 . 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan dalam 1 tahun	95	95	963.562.200	847.903.446	88,0%
				1.02 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	716.542.800	631.123.817	88,1%
				1.02 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemeliharaan jaringan listrik dalam 1 tahun (kali)	2	2	124.239.700	117.266.764	94,4%

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact), Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Tahun ke 1 (2023)				Persentase (%)
							Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1		2		1	2	3	4	5	6	7	8
				1.02 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang yang tersedia /di adakan dalam 1 tahun	10	9	263.964.400	248.732.200	94,2%
				1.02 . 01 . 2.06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi pembelian peralatan rumah tangga dalam 1 tahun (kali)	4	4	34.569.300	12.390.500	35,8%
				1.02 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis barang / bahan yang tersedia /di adakan dalam 1 tahun	90	60	191.300.600	164.631.953	86,1%
				1.02 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan	8	6	75.984.100	63.995.400	84,2%
				1.02 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan	4	4	3.836.200	2.250.000	58,7%
				1.02 . 01 . 2.06 . 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu dalam 1 tahun	600	580	22.648.500	21.857.000	96,5%
				1.02 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa	Cakupan pelaksanaan kegiatan	100%	100%	915.153.400	859.350.859	93,9%
				1.02 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi kegiatan pelayanan surat menyurat dalam 1 tahun (kali)	12	12	1.560.000	251.000	16,1%
				1.02 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam 1 tahun (kali)	12	12	426.767.400	398.848.360	93,5%
				1.02 . 01 . 2.08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi pemeliharaan alat kantor dalam 1 tahun (kali)	12	12	109.395.000	86.222.250	78,8%
				1.02 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi kegiatan pelayanan umum kantor dalam 1 tahun (kali)	12	12	377.431.000	374.029.249	99,1%
				1.02 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	582.489.968	455.894.796	78,3%
				1.02 . 01 . 2.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah kendaraan operasional yang terbayarkan pajaknya dalam 1 tahun	10	10	20.000.000	11.030.300	55,2%
				1.02 . 01 . 2.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang mendapatkan pemeliharaan dalam 1 tahun	10	10	222.714.800	160.457.150	72,0%
				1.02 . 01 . 2.09 . 05	Pemeliharaan Mebel	Frekuensi pemeliharaan mebelair dalam 1 tahun (kali)	4	4	10.000.000	10.000.000	100,0%
				1.02 . 01 . 2.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan alat kantor dalam 1 tahun (kali)	12	12	111.000.000	88.539.546	79,8%

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact), Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Tahun ke 1 (2023)				Persentase (%)
							Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1		2		1	2	3	4	5	6	7	8
				1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Frekuensi pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	3	2	218.775.168	185.867.800	85,0%
				1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan	100%	100%	74.207.170.996	66.513.076.019	89,6%
				1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD	37 Puskesmas	37 Puskesmas	74.207.170.996	66.513.076.019	89,6%
				1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kecamatan STBM	2%	0%	161.648.720.065	133.800.537.569	82,8%
				Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		55%	73,3%				
				Indeks Keluarga Sehat		0,2	0,25				
				Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)		78,5%	100,0%				
				Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin		19%	27,1%				
				AKI		79,23	54,11				
				AKB		6,80	4,49				
				1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100%	100%	50.062.082.840	42.695.450.352	85,3%
				1.02.02.2.01.02	Pembangunan puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang Dibangun	5	5	8.590.000.000	6.862.793.022	79,9%
				1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pengembangan	10	10	4.094.197.600	3.843.303.084	93,9%
				1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang Dilakukan Rehab dan Pemeliharaan	10	9	1.570.932.450	1.551.117.000	98,7%
				1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dibangun/Direhab	6	6	5.321.809.402	5.087.220.846	95,6%
				1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan	10	10	13.606.532.400	11.129.237.691	81,8%
				1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Pengadaan obat dengan tingkat aman	88%	90%	6.338.393.354	5.979.955.052	94,3%
						Jumlah Pengadaan Obat	50	165			
				1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai	50	150	9.143.946.834	7.060.433.203	77,2%

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact), Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Tahun ke 1 (2023)				Persentase (%)
							Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1		2		1	2	3	4	5	6	7	8
				1.02 . 02 . 2.01 . 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala alkes/alat penunjang medik	37 Puskesmas	37 Puskesmas	1.042.975.800	909.492.978	87,2%
				1.02 . 02 . 2.01 . 21	Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makmin ke puskesmas serta faskes lainnya	Obat dan alkes yang di distribusikan dalam satu tahun	100%	100,00%	353.295.000	271.897.476	77,0%
				1.02 . 02 . 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah (Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap)	93%	93%	109.352.762.925	89.207.333.932	81,6%
					Persentase Puskesmas Dengan Kelulusan Akreditasi Minimal Utama	62%	94,59%				
					Persentase tenaga kesehatan tradisional yang dibina	100%	100%				
					Persentase penyehat tradisional yang dibina	29%	29%				
					Persentase desa yang terbentuk Asman TOGA	24%	27,3%				
					Persentase puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad	100%	100,0%				
					Persentase akses sanitasi layak	50%	79,90%				
					Jumlah tingkatan tatanan dalam kabupaten sehat	8	26				
				1.02 . 02 . 2.02 . 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan ibu hamil dilayani sesuai standart (K4)	92%	100%			
				1.02 . 02 . 2.02 . 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan ibu bersalin dilayani sesuai standart	95%	100%	157.985.000	131.431.000	83,2%
				1.02 . 02 . 2.02 . 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Bayi Baru Lahir dilayani sesuai standart (KN2)	96%	100%	56.280.000	21.250.000	37,8%
				1.02 . 02 . 2.02 . 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Balita dilayani sesuai standart	84%	97,92	628.674.314	344.990.688	54,9%
				1.02 . 02 . 2.02 . 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai standart	70%	97,9%	552.527.585	351.644.278	63,6%

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact), Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Tahun ke 1 (2023)				Persentase (%)
							Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1		2		1	2	3	4	5	6	7	8
				1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	90,23%	447.030.555	229.190.750	51,3%
						Persentase Desa Yang Melaksanakan Posbindu	70%	100%			
						Persentase Sekolah yang Melaksanakan KTR	100%	86,4%			
						Persentase Wanita Usia Subur yang melakukan deteksi dini penyakit Kanker payudara dan kanker leher rahim pada usia 30 sd 50 tahun	16%	7,6%			
				1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Sesuai standart	60%	74%	348.114.275	232.881.150	66,9%
				1.02.02.2.02.08	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi dilayani sesuai standar	100%	90,53%	146.683.000	127.472.623	86,9%
				1.02.02.2.02.09	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	Persentase penderita DM dilayani sesuai standar	100%	92,03%	1.606.422.000	1.576.311.010	98,1%
				1.02.02.2.02.10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	100,00%	316.096.165	205.100.105	64,9%
				1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100,00%	404.425.174	305.002.473	75,4%
						Persentase penemuan dan penanganan kasus TB	55%	80,00%			
						Persentase keberhasilan pengobatan TB	90%	88,00%			
				1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	83,00%	200.961.265	141.182.800	70,3%
						Persentase Orang dengan HIV yang mendapatkan ARV	90%	76%			
				1.02.02.2.02.13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi KLB	100%	100%	51.675.500	46.936.400	90,8%

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact), Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Tahun ke 1 (2023)				Persentase (%)
							Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1		2		1	2	3	4	5	6	7	8
				1.02 . 02 . 2.02 . 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan Atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana	1 dokumen	1 dokumen	14.213.000	13.058.000	91,9%
				1.02 . 02 . 2.02 . 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Pemberian Vit A	92%	92,20%	17.524.215.357	9.935.630.622	56,7%
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			14,5%	9,53%				
			Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita			8%	6,12%				
			Prevalensi anemia pada ibu hamil			22%	18%				
				1.02 . 02 . 2.02 . 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pos UKK yang terbentuk	45	67	568.070.058	430.363.498	75,8%
			Persentase jumlah jamaah haji yang diukur kebugaran jasmaninya			100%	100,00%				
			Persentase Tempat Kerja Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja			100%	100,00%				
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga			37 Puskesmas	37 Puskesmas				
			Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja			37 Puskesmas	37 Puskesmas				
			Persentase Kelompok Masyarakat Yang Melaksanakan Aktifitas Fisik			100,00%	100,00%				
				1.02 . 02 . 2.02 . 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Tempat Pengelolaan pangan yang memenuhi syarat sesuai standar	72%	87,55%	891.989.900	687.677.508	77,1%
			Persentase desa ODF			100%	100,00%				
			Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas airnya			83%	85,00%				
			Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis			100	100				
			Persentase Tempat-tempat umum yang dilakukan pengawasan sesuai standar			86,00%	89.43%				
				1.02 . 02 . 2.02 . 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah puskesmas yang melakukan pengelolaan pelayanan promosi	37 puskesmas	37 puskesmas	1.852.247.700	1.168.877.064	89,4%
				1.02 . 02 . 2.02 . 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,	Jumlah tenaga kesehatan tradisional yang dibina	6	6,00%	101.852.000	101.014.523	99,2%

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact), Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Tahun ke 1 (2023)				Persentase (%)
							Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1		2		1	2	3	4	5	6	7	8
					Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah penyehat tradisional yang dibina	416	416			
						Jumlah desa yang terbentuk Asman TOGA	78	94			
						Jumlah puskesmas yang melaksanakan pembinaan	37 Puskesmas	37 Puskesmas			
				1.02 . 02 . 2.02 . 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Presentase KLB yang ditanggulangi ≤ 24 jam	100%	100,00%	580.928.140	170.014.686	29,3%
						Penemuan kasus Non AFP	16	16			
						Penemuan kasus suspect campak	64	64			
				1.02 . 02 . 2.02 . 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	60	100	83.625.000	54.154.900	64,8%
				1.02 . 02 . 2.02 . 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase ODGJ ditangani sesuai standart	100%	100,00%	73.242.245	25.205.100	34,4%
				1.02 . 02 . 2.02 . 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	2	2	3.780.000	3.780.000	100,0%
				1.02 . 02 . 2.02 . 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penderita HT ditangani sesuai standart	100%	90,53%	2.848.806.928	1.613.575.220	56,6%
						Persentase Penderita DM ditangani Sesuai standart	100%	92,03%			
						Persentase WNI usia 15 - 59 tahun mendapatkan screening sesuai standart	100%	90,23%			
						Persentase Penemuan Kusta Pada Anak	<5%	4,0%			
						Persentase Cacat Pada Kasus Kusta Baru	<5%	5,0%			
						Persentase Penderita Kusta RFT-MB	95%	92,0%			
						Persentase Penderita Kusta RDT-PB	100%	100,0%			
						Persentase Cakupan Tatalaksana Pneumonia Balita	50%	22,8%			
						Persentase Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana Diare sesuai standart	80%	70,3%			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact), Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Tahun ke 1 (2023)				Persentase (%)
							Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1		2		1	2	3	4	5	6	7	8
						Persentase Puskesmas yang melaksanakan advokasi dan / sosialisasi Pengendalian PISP	70%	100,0%			
						Persentase Puskesmas yang mempunyai Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)	80%	100,0%			
						Persentase Kasus Diare pada semua umur ditangani sesuai standart	70%	21,3%			
						Persentase Kasus Diare pada Balita ditangani sesuai standart	60%	21,9%			
						Persentase Bumil dilakukan (DDHB) Deteksi Dini Hepatitis B	80%	74,0%			
						Persentase bayi lahir dari Ibu reaktif HBsAg mendapat HBlg < 24 jam	100%	100,0%			
						Persentase bayi usia 9-12 bulan yang mendapat HBlg di test HBsAg hasilnya Non Reaktif	100%	70,0%			
						Persentase kasus DBD ditangani sesuai standart	100%	100,0%			
						Persentase Angka Bebas Jentik (ABJ)	90%	85,0%			
						Persentase anak usia 1-12 Tahun	100%	100,0%			
				1.02 . 02 . 2.02 . 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk dalam data base yang memiliki jaminan kesehatan	95%	96%	68.728.953.079	64.553.122.359	93,9%
				1.02 . 02 . 2.02 . 27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah masyarakat /tokoh masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan NAPZA	60	0			
						Jumlah pengadaan urine test	400	0		-	
				1.02 . 02 . 2.02 . 28	Terlaksananya Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Presentase pengambilan dan pengiriman spesimen ≤ 24 jam ke laboratorium pemeriksa	100%	100%	41.153.565	19.894.140	48,3%
				1.02 . 02 . 2.02 . 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan sehat	24	26	77.951.000	70.841.900	90,9%
				1.02 . 02 . 2.02 . 31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	200	150	8.955.000	110.446.560	1233,4%
				1.02 . 02 . 2.02 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatann operasional pelayanan puskesmas	37 Puskesmas	37 Puskesmas	6.122.525.414	2.808.170.171	45,9%

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact), Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Tahun ke 1 (2023)				Persentase (%)
							Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1		2		1	2	3	4	5	6	7	8
				1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				3.294.999		0,0%
				1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Dengan Kelulusan Akreditasi Paripurna	5	34	990.798.443	828.968.579	83,7%
				1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	341	312	192.432.010	136.647.650	71,0%
						Presentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	94,1%	94,50%			
						Persentase anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan Campak dan Rubella	85,6%	87,30%			
				1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Presentase pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	100,0%	100,00%	107.486.999	104.706.500	97,4%
				1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119)	1	1	260.160.000	254.447.615	97,8%
				1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,2	0,25%	168.476.000	153.741.000	91,3%
				1.02.02.2.02.40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberculosis				32.369.893	7.099.400	21,9%
				1.02.02.2.02.41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV (ODHIV)	Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	100,0%	100,00%	407.197.872	377.195.000	92,6%
						Persentase Orang Dengan HIV Yang Mendapatkan ARV	90%	75,60%			
				1.02.02.2.02.42	Pengelolaan Pelayanan Malaria				275.557.600	130.913.200	47,5%
				1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tingkat ketersediaan sistem informasi kesehatan	37 Puskesmas	37 Puskesmas	240.834.000	231.726.062	96,2%
				1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen informasi yang disusun	2	2	218.834.000	209.726.062	95,8%
				1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah LAN yang terpelihara dan puskesmas yang menggunakan simpus dan e-SPM	38	38	22.000.000	22.000.000	100,0%

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact), Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Tahun ke 1 (2023)				Persentase (%)
							Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1		2		1	2	3	4	5	6	7	8
				1.02 . 02 . 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan	100%	100%	1.993.040.300	1.666.027.223	83,6%
						Jumlah Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%)	16,2%	91,89%		-	
						Jumlah keluarga yang mendapat intervensi sesuai hasil survey KS	15,0%	97,59%		-	
						Jumlah Klinik Pratama yg terakreditasi	20%	58,82%			
						Persentase RS yang terakreditasi paripurna	36,36%	90,90%			
						Persentase Klinik Utama yang terakreditasi	0%	40,00%			
						Persentase lab Madya yang terakreditasi	0%	0,00%			
				1.02 . 02 . 2.04 . 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%)	16,20%	91,89%	1.926.677.300	1.613.846.843	83,8%
						Jumlah keluarga yang mendapat intervensi sesuai hasil survey KS	15%	97,59%			
						Jumlah Klinik Pratama yg terakreditasi	20%	58,82%			
				1.02 . 02 . 2.04 . 04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah RS yang terakreditasi paripurna	4 RS	10 RS	66.363.000	52.180.380	78,6%
				01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan	100%	100%	1.613.413.600	1.503.176.446	93,2%
				01.02.03.2.01	Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota	Jumlah ijin praktik yang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan	1250	2241	9.500.000	9.368.000	98,6%
				01.02.03.2.01.01	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah Nakes yang memiliki SIP/SIK yang berlaku pada faskes dibandingkan jumlah nakes yang terdaftar di sistem SISDMK di Faskes pemerintahan	100	100	7.500.000	7.500.000	100,0%
				01.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui faskes dan organisasi profesi	100%	100%	2.000.000	1.868.000	93,4%

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact), Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Tahun ke 1 (2023)				Persentase (%)
							Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1		2		1	2	3	4	5	6	7	8
				01.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya perencanaan SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah	100%	100%	124.806.000	89.006.000	71,3%
				01.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya dokumen penyusunan perencanaan kebutuhan SDM di Faskes Pemerintahan	100%	100%	5.260.000	5.260.000	100,0%
				01.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan SDM di Faskes Pemerintahan	100%	100%	119.546.000	83.746.000	70,1%
				01.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN Yang Dikembangkan Kompetensinya	100%	100%	1.479.107.600	1.404.802.446	95,0%
				01.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahun	60	197	1.479.107.600	1.404.802.446	95,0%
				1.02 . 04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Prosentase Pemberian Rekomendasi Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan UMOT	75%	75%	815.256.940	511.093.054	62,7%
						Prosentase Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Bersertifikat	75%	100%			
				1.02 . 04 . 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, UMOT	Jumlah rekomendasi Apotek, TO, Tk Alkes dan Optikal UMOT yang diterbitkan	20	80	142.233.660	56.201.600	39,5%
						Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, UMOT yang dibina dan diawasi	30%	48,00%			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact), Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Tahun ke 1 (2023)				Persentase (%)
							Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1		2		1	2	3	4	5	6	7	8
				1.02 . 04 . 2.01 . 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah rekomendasi Apotek, TO, toko alkes, dan optikal , UMOT yang memenuhi persyaratan	20	80	142.233.660	56.201.600	39,5%
						Jumlah apotek, TO, toko alkes, dan optikal , UMOT yang dibina dan diawasi	48	48			
				1.02 . 04 . 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sertifikat P-IRT yang diterbitkan	126	16	337.360.200	263.306.998	78,0%
				1.02 . 04 . 2.03 . 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah produsen industri rumah tangga yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksinya	126	16	337.360.200	263.306.998	78,0%
				1.02 . 04 . 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain : Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum	Presentase TPM yang ber SLHS	80%	3%	56.106.000	50.256.000	89,6%

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact), Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Tahun ke 1 (2023)				Persentase (%)
							Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1		2		1	2	3	4	5	6	7	8
				1.02 . 04 . 2.04 . 01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain : Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum yang diterbitkan	100	100	56.106.000	50.256.000	89,6%
				1.02 . 04 . 2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Presentase stikerisasi pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	80%	80%	5.244.000	4.944.000	94,3%
				1.02 . 04 . 2.05 . 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut penerbitan Stiker pembinaan pada makanan Jajanan dan Sentra makanan jajanan	Jumlah stikerisasi pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	200	200	5.244.000	4.944.000	94,3%
				1.02 . 04 . 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Prosentase pemeriksaan produksi makanan minuman industri rumah tangga	3,77%	40%	274.313.080	191.584.456	69,8%
				1.02 . 04 . 2.06 . 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase produsen industri rumah tangga yang dibina dan diawasi	100%	100%	274.313.080	191.584.456	69,8%
				1.02 . 05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)	67%	59,00%	3.138.641.593	2.176.171.756	69,3%
				1.02 . 05 . 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	frekuensi kegiatan tim pokjnal tk. Kabupaten, kecamatan dan desa dalam satu tahun	2	2	423.830.100	399.897.100	94,4%

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact), Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Tahun ke 1 (2023)				Persentase (%)
							Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1		2		1	2	3	4	5	6	7	8
				1.02 . 05 . 2.01 . 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah lintas sektor/ organisasi masyarakat/ organisasi profesi/ dunia usaha yang bermitra dengan UKBM	2	2	423.830.100	399.897.100	94,4%
				1.02 . 05 . 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah media KIE yang digunakan dalam satu tahun	5	5	390.655.300	340.394.406	87,1%
				1.02 . 05 . 2.02 . 01	Peningkatan upaya promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Jumlah tema KIE program prioritas yang dipromosikan melalui media	5	5	390.655.300	340.394.406	87,1%
				1.02 . 05 . 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi kesehatan masyarakat skala desa	100%	100%	2.324.156.193	1.435.880.250	61,8%
						Cakupan promosi kesehatan tingkat desa	100%	100%			
						Cakupan kelompok kesehatan masyarakat yang dibina	100%	100%			
						Persentase Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	88%	96,18%			
						Persentase poskesdes purnama mandiri (PURI)	18%	21,51%			
						persentase poskestren purnama mandiri (PURI)	47%	35,48%			
						persentase saka Bhakti Husada (SBH) purnama Mandiri (PURI)	20%	23,08%			
						persentase desa-kelurahan siaga aktif	18%	37,20%			
				1.02 . 05 . 2.03 . 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	frekuensi bimbingan teknis dan supervisi UKBM yang dilakukan selama satu tahun	6	6	2.324.156.193	1.435.880.250	61,8%
									327.947.380.389	287.206.959.590	87,6%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2023 yang memuat realisasi kinerja dan prosentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan Tahun 2023. Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri tidak terlepas dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), fungsi perencanaan (Planning) yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada RPJMD, RKPD maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja hingga pelaksanaan pembangunan kesehatan itu sendiri sebagai fungsi actuating dan kemudian pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan sebagai fungsi controlling.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Di dalam prosesnya pengukuran dilakukan pada aspek kegiatan, program dan sasaran. Pada prinsipnya pengukuran dilakukan untuk melihat atau mengevaluasi sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan sesuai dengan arah yang diinginkan dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Piranti pengukurannya berupa Pengukuran Kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026 yang telah disusun target capaian kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan tahun 2023 dituangkan dalam sasaran strategisnya.

Untuk mengetahui keberhasilan rencana strategis yang telah dilakukan maka akan dijabarkan keberhasilan capaian kinerja per sasaran dalam renstra.

a. Pencapaian Kinerja

Dalam dokumen renstra terdapat tujuan dan sasaran yang masing – masing memiliki indikator kinerja, yang mendukung visi dan misi Bupati dalam bidang pembangunan kesehatan. Dalam uraian di berikut ini akan disajikan capaian dari tujuan dan sasaran strategis dalam renstra.

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2023	Realisasi 2023	% capaian
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	1. Indeks Kesehatan (Umur Harapan Hidup)	72,68	73,27	100,81

Pada tahun 2023 Umur Harapan Hidup Kabupaten Kediri sebesar 73,27.

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	1. Persentase masyarakat yang memiliki jaminan Kesehatan	74%	96%	129,72%
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	2. Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama	64%	92,31%	144,23%

Hasil capaian kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri disesuaikan dengan indikator Kinerja Utama 2023 disajikan per indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran kinerja pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja persentase masyarakat

yang memiliki jaminan kesehatan sebesar 96%, sudah melebihi target yang ditetapkan (74%), Sebanyak 1.607.772 jiwa dengan segmen kepesertaan PBIN sebanyak 801.252 jiwa, PBID sebanyak 296.483 jiwa, BP sebanyak 34.585 jiwa, PBPU sebanyak 187.536 jiwa, PPU BU sebanyak 222.002 jiwa dan PPU PN sebanyak 65.914 Jiwa.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen dari lintas sector dan semua pihak yang ada dalam Tim Percepatan UHC untuk berperan sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya masing-masing

Komitmen Kepala Daerah yang besar terhadap sektor kesehatan di Kabupaten Kediri menjadi faktor pendukung yang utama kemudahan proses perjalanan program dan kegiatan yang telah ditargetkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

Dukungan Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin pembiayaan kesehatan masyarakat antara lain dengan penguatan regulasi dan penyediaan anggaran untuk pembayaran iuran dan bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama

Fasilitas Kesehatan Pemerintah yang ada di Kabupaten Kediri sebanyak 39 Faskes yang terdiri atas 37 Puskesmas dan 2 RSUD (RSUD Kabupaten Kediri dan RSUD Simpang Lima Gumul). Sampai dengan akhir Desember 2023 masih terdapat 2 puskesmas yang belum dilakukan survei reakreditasi yaitu Puskesmas Bendo dan Kandangan. Rencana pengajuan dan pelaksanaan survei reakreditasi 2 puskesmas tersebut akan dilakukan pada TriWulan 1 Tahun 2024. Sehingga pada tahun 2023 sebanyak 35 puskesmas telah melakukan survey reakreditasi puskesmas (94,59%) dengan status akreditasi 100% Paripurna (34 puskesmas), 1 puskesmas masih menunggu hasil. Sedangkan 2 RSUD sampai akhir Desember 2023 masih berstatus Paripurna. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 36 Faskes Pemerintah telah bersatus akreditasi Paripurna (92,31%).

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian target khususnya untuk peningkatan status akreditasi puskesmas adalah peran Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) yang secara aktif melakukan pembinaan dan pendampingan sebelum dan pada saat kegiatan penilaian akreditasi. Selain itu sangat besar peran dan kekompakan semua tim puskesmas dalam mempersiapkan dokumen dan bukti kegiatan sesuai dengan standar akreditasi. Dukungan anggaran untuk memenuhi standar sarana, prasarana dan alat kesehatan juga sangat mempengaruhi pencapaian hasil akreditasi.

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dengan indikator capaian yaitu persentase kecamatan STBM, persentase FKTP terakreditasi, indeks keluarga sehat, persentase FKTL terakreditasi, persentase nakestrad dan hattra yang memiliki izin, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi yang diimplementasikan melalui empat kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan dimaksud dijabarkan dalam sembilan sub kegiatan yaitu:

- a. Pembangunan Puskesmas
- b. Pengembangan Puskesmas
- c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
- d. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- e. Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- f. Pengadaan Obat Vaksin
- g. Pengadaan Bahan Habis Pakai
- h. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- i. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan lainnya.
2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Kegiatan tersebut dijabarkan dalam dua puluh sembilan sub kegiatan yaitu :
 - a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
 - h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - l. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV
 - m. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - n. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - o. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - p. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - q. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
 - r. Pengelolaan Surveilans Kesehatan

- s. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
 - t. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - u. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - v. Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
 - w. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional
 - x. Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat
 - y. Operasional Pelayanan Puskesmas
 - z. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - aa. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - bb. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
 - cc. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
 - dd. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana
 - ee. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 - ff. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dengan Masalah Kesehatan (ODMK)
 - gg. Pengelolaan Upaya Pelayanan Kesehatan Khusus
 - hh. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
 - ii. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
 - jj. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV (ODHIV)
 - kk. Pengelolaan Pelayanan Malaria
3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- Kegiatan tersebut dijabarkan dalam dua sub kegiatan yaitu :
- a. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

- b. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- 4. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Kegiatan tersebut dijabarkan dalam dua sub kegiatan yaitu :
 - a. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
 - b. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Realisasi indikator kinerja program pada tahun 2023 akan disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja program	Target 2023	Realisasi 2023	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan keesehatan	Persentase Kecamatan STBM	2%	0 %	0%
	Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi	55%	73,3%	133,27%
		Indeks Keluarga Sehat	0,2	0,25	125%
		Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) terakreditasi	78,5%	100%	127,39%
		Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin	19%	27,1%	142,63%

		Angka Kematian Ibu	79,23/100.000 KH	54,11 / 100.000 KH	131,71%
		Angka Kematian bayi	6,8 / 1.000 KH	4,49 / 1.000 KH	133,97%

Dari tabel di atas diketahui bahwa Capaian Kinerja Program Pemenuhan UKP dan UKM Tahun 2023 terdapat 6 indikator nilainya mencapai 100% lebih.

Ada beberapa capaian yang mendukung tercapainya target indikator kinerja program diantaranya :

1. Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi sampai dengan Tahun 2023 dengan capaian sebesar 73,3%.

Indikator terkait Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) meliputi:

- a. Persentase puskesmas terakreditasi
- b. Persentase klinik pratama terakreditasi
- c. Persentase puskesmas dengan status kelulusan akreditasi paripurna
- d. Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terakreditasi minimal Utama.

Realisasi capaian sebesar 73,33% yang berarti melebihi target yang ditetapkan (55%). Sejumlah 66 dari 90 FKTP baik puskesmas maupun klinik di Kabupaten Kediri telah terakreditasi dengan status minimal Utama. Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kabupaten Kediri yang terregistrasi terdiri dari 37 puskesmas, 51 klinik pratama dan 2 klinik Utama.

2. Indeks Keluarga Sehat

Realisasi capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) Tahun 2023 sebesar 0,25 sehingga telah melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 0,20. Hasil IKS Tahun 2020 sebesar 0,14 dan IKS tahun 2021 adalah 0,15 dan tahun 2022 sebesar 0,201.

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan secara significant IKS di Kabupaten Kediri dibandingkan tahun sebelumnya. Kegiatan intervensi lanjut, crosscheck data, supervisi monitoring bersama pemegang program serta update data di aplikasi KS merupakan faktor yang mendukung peningkatan Indeks Keluarga Sehat

3. Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKTL) yang terakreditasi capaiannya 127,39%. Persentase rumah sakit yang terakreditasi paripurna sesuai standart capaian sudah melebihi target yaitu dari target awal sebanyak 4 rumah sakit, pada akhir tahun tercapai 10 rumah sakit yang terakreditasi paripurna. Sampai dengan akhir tahun 2023 jumlah rumah sakit yang terakreditasi paripurna sebanyak 10 rumah sakit yaitu RSUD Kabupaten Kediri, RS Toeloengredjo, RS Muhammadiyah Siti Khodijah, RS Aura Syifa, RSUD Simpang Lima Gumul, RS Wilujeng, RS Surya Melati, RS Amelia, RS Arga Husada dan RSIA Kasih Bunda. Terdapat peningkatan status akreditasi dari 6 rumah sakit di Kabupaten Kediri yaitu RS Wilujeng dan RS Surya Melati yang sebelumnya terakreditasi utama meningkat menjadi paripurna, RS Amelia yang sebelumnya terakreditasi madya meningkat menjadi paripurna, RS Arga Husada yang sebelumnya terakreditasi dasar menjadi paripurna, RSIA Kasih Bunda yang sebelumnya terakreditasi perdana meningkat menjadi paripurna dan RSIA Permata Hati yang sebelumnya terakreditasi perdana meningkat menjadi utama. Sedangkan 5 rumah sakit lainnya mampu mempertahankan status akreditasi paripurna yaitu RSUD Kabupaten Kediri, RS Toeloengredjo, RS Muhammadiyah Siti Khodijah, RS Aura Syifa, RSUD Simpang Lima Gumul. Capaian Tenaga Kesehatan Tradisional (Nakestrad) dan Pengobat/Penyehat Tradisional (Hattra) yang memiliki ijin sampai dengan tahun 2023 sebesar 13,5% belum memenuhi target yang ditentukan sebesar 17%.
4. Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki ijin
Realisasi kinerja Nakestrad dan Hattra yang memiliki ijin (27,1%) telah melebihi target yang ditetapkan (19%), sehingga capaian kinerjanya

sebesar 142,63%. Terlaksananya perizinan empiris bagi penyehat tradisional yaitu Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) sampai dengan tahun 2023 jumlah kumulatifnya sejumlah 346 orang sedangkan untuk tahun 2023 saja terdapat 59 STPT ; Perizinan bagi tenaga kesehatan tradisional (Nakestrad) sejumlah 5 orang terdiri dari yaitu Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT) sejumlah 2 orang berlokasi di wilayah Puskesmas Kandangan dan Puhjarak dan untuk ijin SIPAT (Surat Ijin Praktik Akupunktur Terapis) ada 3 orang yang berpraktik di wilayah Puskesmas Sidorejo; Puskesmas Papar dan Puskesmas Adan-adan; Ada satu (1) orang tenaga kesehatan tradisional yang belum mengurus ijin karena persyaratan STR belum ada sehingga dari 6 tenaga kesehatan tradisional sudah ada 5 yang memiliki ijin. Jadi nilai absolut untuk Nakestrad 5 ijin dari 6 dan Hattra 346 dari 1290 jadi $346 + 5 = 351$ ijin dibagi $1290 + 6 = 1296$ dan digabung menjadi 351 dibagi 1296 dikalikan 100 % menjadi 27,1%. Dengan demikian dari target 19 % untuk Nakestrad dan Hattra yang memiliki ijin terealisasi 27,1%

5. Target Angka Kematian Ibu Tahun 2023 sebesar 79,23 per 100.000 KH, realisasi AKI sebesar 54,11 per 100.000 KH. Angka Kematian Ibu menurun dengan signifikan, hal ini karena pelayanan kesehatan terus meningkat lebih baik dari mutu dan kualitasnya. Jumlah kematian ibu turun dari angka 11 menjadi angka 10 ditahun 2023.

Penyebab kematian ibu masih berkutat pada Pre Eklamsia sebanyak 30 %, perdarahan 20%, jantung 30% sisanya penyebab lain-lain sebanyak 20%. Usia kematian ibu terbanyak pada golongan usia produktif sebanyak 73 %. Kematian ibu hampir seluruhnya terjadi pada masa sesudah persalinan atau masa nifas.

6. Target Angka Kematian Bayi Tahun 2023 sebesar 6,8 per 1.000 KH, realisasi AKB sebesar 4,49 per 1.000 KH. AKB juga menurun dari tahun sebelumnya dengan jumlah kematian bayi sebanyak 83 kematian bayi di tahun 2023, sedangkan tahun 2022 sebanyak 122 kematian bayi.

Ada satu indikator kinerja program yang masih bernilai 0, dikarenakan untuk menuju kecamatan STBM masih dilakukan proses verifikasi tingkat desa.

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat upaya yang dilakukan antara lain :

- a. Menyegerakan proses verifikasi tingkat desa
- b. Memaksimalkan pembinaan terpadu, monitoring dan evaluasi terhadap FKTP (puskesmas dan Klinik Pratama)
- c. Memaksimalkan koordinasi dan kerjasama lintas program terutama dalam penggunaan/pemanfaatan data Keluarga Sehat untuk mendukung kegiatan program dan peningkatan capaian intervensi lanjut
- d. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKTL) yaitu RS, Klinik Utama Rawat Inap dan laboratorium.
- e. Melaksanakan pembinaan sistem pelaporan di rumah sakit
- f. Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini kader dalam menghadapi krisis kesehatan
- g. Peningkatan kapasitas petugas rumah sakit dan petugas puskesmas dalam penanganan kegawatdaruratan medis.
- h. Melaksanakan pembinaan sistem pelaporan rumah sakit
- i. Peningkatan kesiapsiagaan petugas puskesmas dan petugas rumah sakit dalam menghadapi bencana dan monitoring evaluasi kesiapsiagaan puskesmas dalam menghadapi bencana
- j. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kemampuan bantuan hidup dasar/Basic Life Support (BLS)
- k. Peningkatan penguatan sistem rujukan bagi fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL) dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi mutu dan akreditasi bagi fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL)

- m. Pembentukan UPT PSC 119
- n. Memaksimalkan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya izin STPT dan SIPTKT untuk pengobat dan penyehat tradisional (Hattra) yang belum memiliki izin
- o. Dalam rangka menjaga mutu pelayanan akan memaksimalkan pembinaan oleh Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) terhadap 34 Puskesmas yaitu monitoring pasca akreditasi terutama dalam penyusunan dan pelaksanaan PPS (Perencanaan Perbaikan Strategis) serta pembinaan persiapan survei reakreditasi terhadap 3 Puskesmas yang akan disurvei Tahun 2024.
- p. Memaksimalkan pembinaan terhadap 27 Klinik Pratama dan Utama agar dapat segera terakreditasi Tahun 2024 termasuk juga mendorong dan mendampingi TPMD dan TPMDG agar bisa memenuhi persyaratan untuk dilakukan survei akreditasi
- q. Melaksanakan pembinaan, monitoring penyusunan dan pelaksanaan PPS (Perencanaan Perbaikan Strategis) terhadap 32 Klinik Pratama dan Utama yang telah diterbitkan penetapan status akreditasinya Tahun 2023
- r. Melaksanakan pembinaan dan monitoring evaluasi mutu (pengukuran dan pelaporan Indikator Nasional Mutu, IKP) di puskesmas, klinik, laboratorium, TPMD dan TPMDG
- s. Melaksanakan pembinaan dan monitoring evaluasi terhadap implementasi Rekam Medis Elektronik di puskesmas, klinik, TPMD dan TPMDG.
- t. Mengoptimalkan koordinasi antara pemegang program PIS-PK dengan pemegang program lain baik di puskesmas maupun Dinas Kesehatan melalui sinkronisasi data Keluarga Sehat dengan data program agar dapat saling mendukung pencapaian target SPM.
- u. Melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan intervensi lanjut yang terintegrasi antara program Keluarga Sehat dengan program lain yang terkait serta memastikan penginputan/updating data hasil intervensi.

- v. Mengawal persiapan dan implementasi Integrasi Layanan Primer di puskesmas dan Pustu.
- w. Melakukan skrening ibu hamil
- x. Melaksanakan Monitoring pelayanan ibu hamil,ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir
- y. Membahas alur tatalaksana layanan maternal rujukan
- z. Mengaktifkan kelas ibu hamil
- aa. Meningkatkan Kerjasama Dengan Lintas Sektor utamanya dengan PKK
- bb. Membuka Persalinan di Puskesmas dan rujukan ke tingkat lanjut
- cc. Menyiapkan rujukan terencana

A. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 9 Sub Kegiatan yaitu : 1) Pembangunan Puskesmas; 2) Pengembangan Puskesmas; 3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas; 4) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 5) Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6) Pengadaan Obat, Vaksin; 7) Pengadaan Bahan Habis Pakai; 8) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 9) Distribusi alat Kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makmin ke puskesmas serta faskes lainnya.

Realisasi indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 akan disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan	Persentase masyarakat yang memiliki	Cakupan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	100%	100%	100%

kesehatan masyarakat	jaminan kesehatan	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan			
	Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama	Jumlah Puskesmas yang dibangun	5 Puskesmas	5 Puskesmas	100%
		Jumlah Puskesmas yang dilakukan pengembangan	10 Puskesmas	10 Puskesmas	100%
		Jumlah puskesmas yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	10 Puskesmas	10 Puskesmas	100%
		Jumlah prasarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang dibangun atau direhab	6 lokasi	6 lokasi	100%
		Jumlah pengadaan alat kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10 paket	10 paket	100%
		Persentase Pengadaan obat dengan tingkat aman	88%	90%	102,3%
		Jumlah pengadaan obat	50	165	330%
		Jumlah pengadaan bahan habis pakai	50	150	300%
		Jumlah Puskesmas yang dilakukan kegiatan	37 puskesmas	37 puskesmas	100%

		pemeliharaan rutin dan berkala alkes/alat penunjang medik			
		Obat dan alkes yang di distribusikan dalam satu tahun	100%	100%	100%

Capaian indikator kinerja kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatannya dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk capaian persentase penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota tercapai 100 % dimana semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan.
2. Pada tahun anggaran 2023 dilakukan Pembangunan Puskesmas untuk 5 lokasi yaitu : Puskesmas Plosoklaten, Kandangan, Keling, Kunjang dan Purwoasri. Puskesmas Keling terjadi keterlambatan dua hari dan Puskesmas Kunjang terjadi keterlambatan satu hari.
3. Kegiatan Pengembangan Puskesmas di 10 lokasi yaitu Pengembangan Puskesmas Bendo, Sidorejo, Blabak, Pustu Selang, ustu Plosorejo, Puskesmas Sidomulyo, Puskesmas Papar, Puskesmas Ngadiluwih, Pustu Pandansari, Pustu Klampisan.
4. Sub kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas direncanakan ada 9 paket pekerjaan yaitu dengan lokasi di Pustu Jerukwangi, pustu Ngletih, Pustu SumberAgung, Pustu Tengger, Pustu Canggung, Puskesmas Bangsongan, Pranggang, Wonorejo, Puskesmas Tiron, Pustu Asmorobangun.
5. Indikator sub kegiatan pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan pengadaan genset untuk puskesmas Sidorejo, Kepung, Pare, Sumberjo, Bangsongan, dan Kras.
6. Pengadaan alat kesehatan dialokasikan untuk 4 Puskesmas yaitu Puskesmas Tarokan (Pustu Selang), Sidorejo, Keling dan Pelas. Bila melihat jumlah pakettercapai target, namun jika dilihat dari jenis/jumlah

alat kesehatan ada beberapa yang tidak terealisasi. Hal ini disebabkan karena terjadi perubahan harga yang melebihi pagu anggaran dan juga barang tidak tersedia di ecatalog. Selain itu juga untuk pengadaan antropometri untuk posyandu.

7. Untuk sub kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin terdapat 2 indikator yaitu Persentase obat dengan tingkat aman serta Jumlah pengadaan obat. Capaian indikator pengadaan obat dan perbekalan Kesehatan dengan tingkat aman pada tahun 2023 sebesar 90% dari target 88%.

Dalam rangka memberikan jaminan akan persediaan obat dan perbekalan kesehatan maka perlu adanya upaya pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan jenis dan jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Persediaan obat sesuai kebutuhan adalah jumlah obat yang mampu disediakan pemerintah dibandingkan dengan jumlah obat yang dibutuhkan rakyat dalam pelayanan kesehatan dasar yang diselenggarakan pemerintah.

Untuk pengadaan obat yang terbeli selama tahun 2023 sebanyak 165 paket.

8. Untuk indikator sub kegiatan pengadaan bahan habis pakai terbeli 150 paket selama tahun 2023
9. Capaian indikator sub kegiatan pemeliharaan rutin berkala alkes atau alat penunjang medik di fasyankes terealisasi 100 % dimana sebanyak 37 puskesmas telah dilakukan kegiatan pemeliharaan alkesnya
10. Capaian indikator sub kegiatan distribusi alat Kesehatan, obat, vaksin, BMHP ke puskesmas serta faskes lainnya terealisasi 100% dimana pendistribusian Obat, BMHP dan vaksin selama tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, terutama dari sumber anggaran droping, sedangkan untuk obat dan BMHP untuk pelayanan rutin di fasilitas kesehatan (Puskesmas) mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, karena masyarakat sudah berani untuk memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan.

Rencana Tindak Lanjut dari kegiatan pemenuhan ketersediaan dan pendistribusian obat BMHP yang akan dilakukan di tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Persentase Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dengan tingkat aman
 - a. Mengajukan usulan penghapusan obat kadaluwarsa dan rusak kepada Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Kediri agar diterbitkannya surat keputusan Bupati penghapusan obat dan BMHP.
 - b. Meningkatkan keamanan obat dan BMHP dan pencegahan dari gangguan/serangan hewan pengganggu.
 - c. Meningkatkan pengamatan mutu secara fisik dan pemantauan suhu secara berkala.
 - d. Meningkatkan monitoring dan stok opnam secara berkala untuk mencegah terjadinya obat habis karena tidak terpakai.
2. Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
 - a. Melakukan penataan obat dan BMHP untuk memudahkan pemantauan.
 - b. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan pengelola program maupun tim pengadaan obat dan BMHP dalam menyusun perencanaan kebutuhan obat dan BMHP sehingga diperoleh kebutuhan obat dan BMHP yang lebih tepat (mencegah terjadinya kekosongan maupun over stock)
3. Persentase kegiatan monitoring obat dan perbekalan kesehatan
 - a. Meningkatkan kualitas monitoring obat dan BMHP
 - b. Meningkatkan pengawasan kepada petugas dalam kegiatan monitoring obat dan BMHP.
 - c. Persentase pelaporan obat dan perbekalan kesehatan puskesmas (LPLPO) yang benar
 - d. Mengevaluasi dan memverifikasi pelaporan obat dan BMHP dari puskesmas secara intensif

- e. Melaksanakan kegiatan validasi data obat dan BMHP secara berkala dengan pengelola obat di puskesmas
- f. Menerapkan system aplikasi e – logistik dalam pengelolaan obat dan BMHP di UPT BPAK
- g. Meningkatkan kemampuan dan kopetensi petugas pengelola obat dan BMHP melalui pelatihan-pelatihan dalam pengelolaan obat dan BMHP.

B. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 29 Sub Kegiatan yaitu :

- 1. Pengelolaam Pelayanan Ibu Hamil;
- 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita;
- 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus
- 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Gangguan Jiwa Berat
- 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- 12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV
- 13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB
- 14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi Bencana
- 15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- 16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- 17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

18. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan tradisional Lainnya
20. Pengelolaan Surveilans Kesehatan
21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
22. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
23. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
24. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
25. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
26. Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
27. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
28. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
29. Operasional Pelayanan Puskesmas
30. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
31. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
32. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)
33. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
34. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
35. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
36. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberculosis
37. Pengelolaan Pelayanan Melalui Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV (ODHIV)
38. Pengelolaan Pelayanan Malaria

Realisasi indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 akan disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja kegiatan dan subkegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan mutu kualitas pelayanan kesehatan	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	Cakupan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah (Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap)	93%	93%	100,00%
	Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama	Persentase Puskesmas Dengan Kelulusan Akreditasi Minimal Utama	62%	94,59%	152,56%
		Persentase tenaga kesehatan tradisional yang dibina	100%	100%	100,00%
		Persentase penyehat tradisional yang dibina	29%	29%	100%
		Persentase desa yang terbentuk Asman TOGA	24%	27,3%	113,75%
		Persentase puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad	100%	100%	100,00%
		Persentase akses sanitasi layak	50%	79,9%	159,8%

		Jumlah tingkatan tatanan dalam kabupaten sehat	8	26	325%
		Cakupan ibu hamil dilayani sesuai standart (K4)	92%	100%	108,7%
		Cakupan ibu bersalin dilayani sesuai standart	95%	100%	105,3%
		Cakupan Bayi Baru Lahir dilayani sesuai standart (KN2)	96%	100%	104,17%
		Cakupan Balita dilayani sesuai standart	84%	97,92%	116,57%
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai standart	70%	97,9%	139,86%
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	90,23%	90,23%
		Persentase desa yang melaksanakan posbindu	70%	100%	142,86%
		Persentase sekolah yang melaksanakan KTR	100%	86,4%	86,4%
		Persentase Wanita Usia Subur (WUS)	16%	7,6%	47,5%

		yang melakukan deteksi dini penyakit kanker payudara dan kanker leher rahim pada usia 30-50 tahun			
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Sesuai standart	60%	74%	123,33%
		Persentase penderita hipertensi dilayani sesuai standar	100%	90,53%	90,53%
		Persentase penderita DM dilayani sesuai standar	100%	92,03%	92,03%
		Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	100%	100%
		Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	100%
		Persentase penemuan dan penanganan kasus TB	55%	80%	145,55%
		Persentase keberhasilan	90%	88%	97,77%

		pengobatan TB			
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	83%	83%
		Persentase Orang dengan HIV yang mendapatkan ARV	90%	76%	84%
		Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi KLB	100%	100%	100,00%
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Cakupan Pemberian Vit A	92%	92,20%	100,22%
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14,5%	9,53%	134,3%
		Prevalensi wasting (kurus dan sangat	8%	6,12%	123,5%

		kurus) pada balita			
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	22%	18%	81,8%
		Jumlah Pos UKK yang terbentuk	45 Pos	67 Pos	148,89%
		Persentase jumlah jamaah haji yang diukur kebugaran jasmaninya	100%	100%	100%
		Persentase tempat kerja yang melaksanakan kesehatan kerja	100%	100%	100%
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga	37 puskesmas	37 puskesmas	100,00%
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	37 puskesmas	37 puskesmas	100,00%
		Persentase kelompok masyarakat yang melaksanakan aktivitas fisik	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase Tempat Pengelolaan pangan yang memenuhi syarat sesuai standar	72%	87,55%	121,6%

	Persentase desa ODF	100%	100%	100%
	Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas airnya	83%	85%	102,41%
	Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis	100%	100%	100%
	Persentase Tempat-tempat umum yang dilakukan pengawasan sesuai standar	86%	89,43 %	103,99%
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	37 puskesmas	37 puskesmas	100%
	Jumlah tenaga kesehatan tradisional yang dibina	6	6	100%
	Jumlah penyehat tradisional yang dibina	416	416	100%
	Jumlah desa yang terbentuk Asman TOGA	78	94	120,5%
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan	37 puskesmas	37 puskesmas	100,00%

	pembinaan yankestrad			
	Presentase KLB yang ditanggulangi ≤ 24 jam	100%	100%	100,00%
	Penemuan kasus non AFP	6 kasus	6 kasus	100%
	Penemuan kasus suspect campak	64 kasus	64 kasus	100%
	Jumlah orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	60	100	166,67%
	Persentase ODGJ ditangani sesuai standar	100%	100%	100%
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Persentase penderita HT ditangani sesuai standart	100%	90,53%	90,53%
	Persentase Penderita DM ditangani Sesuai standart	100%	92,03%	92,03%
	Persentase WNI usia 15 - 59 tahun mendapatkan screening	100,0%	90,23%	90,23%

	sesuai standart			
	Persentase penemuan kusta pada anak	<5%	<4%	80%
	Persentase cacat pada kasus kusta baru	<5%	<5%	100,00%
	Persentase penderita kusta RFT-MB	95,0%	92%	96,84%
	Persentase penderita kusta RFT-PB	100,0%	100,0%	100,00%
	Persentase cakupan tatalaksana pneumonia balita	50%	22,8%	45,6%
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana Diare sesuai standart	80,0%	70,3%	87,88%
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan advokasi dan / sosialisasi Pengendalian PISP	70%	100%	142,86%
	Persentase Puskesmas yang mempunyai Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)	80%	100%	125%
	Persentase Kasus Diare pada semua umur	70,0%	21,3%	30,43%

		ditangani sesuai standart			
		Persentase Kasus Diare pada Balita ditangani sesuai standart	60%	21,9%	36,5%
		Persentase Bumil dilakukan (DDHB) Deteksi Dini Hepatitis B	80%	74%	92,5%
		Persentase bayi lahir dari Ibu reaktif HBsAg mendapat HBIg < 24 jam	100,0%	100,0%	100,0%
		Persentase bayi usia 9-12 bulan yang mendapat HBIg di test HBsAg hasilnya Non Reaktif	100,0%	70%	70%
		Persentase kasus DBD ditangani sesuai standart	100%	100%	100%
		Persentase Angka Bebas Jentik (ABJ)	≥ 90 %	83%	92,22%
		Persentase anak usia 1-12 Tahun mendapatkan obat Cacing	100%	100%	100%
		Persentase penduduk dalam data base yang	95%	96%	101,05%

	memiliki jaminan kesehatan			
	Jumlah masyarakat /tokoh masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan NAPZA	60 org	0 org	0%
	Presentase pengambilan dan pengiriman spesimen ≤ 24 jam ke laboratorium pemeriksa	100%	100%	100,00%
	Jumlah Kecamatan sehat	24 Kec.	26 Kec	108,33%
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan penelitian kesehatan	200	150	75%
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan operasional fasyankes	37 puskesmas	37 puskesmas	100,00%
	Jumlah Puskesmas Dengan Kelulusan Akreditasi Minimal Utama	5 puskesmas	34 puskesmas	680%
	Jumlah desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap	341	312	91,5%

		anak usia 0-11 bulan			
		Presentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	94,1%	94,5%	100,43%
		Persentase anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan Campak dan Rubella	85,6%	87,30%	101,99%
		Presentase pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	100,0%	100,0%	100,00%
		Jumlah Public Safety Center (PSC)	1 unit	1 unit	100%
		Capaian indeks keluarga sehat	0,2	0,25	125%
		Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	100%
		Persentase orang dengan HIV yang mendapatkan ARV	90%	75,60%	84%

Dari tabel di atas dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Persentase puskesmas dengan kelulusan akreditasi minimal utama tercapai melebihi target yang ditetapkan yaitu 94,59% dengan penjabaran 34 puskesmas paripurna dan 1 puskesmas masih menunggu hasil. 2 puskesmas akan melaksanakan survey tahun 2024.
2. Dari target tenaga kesehatan tradisional yang dibina pada tahun 2023 tercapai 100%.
3. Dari target 24% Kelompok Asuhan Mandiri yang terbentuk sampai tahun 2023 adalah 94 Desa yang memiliki Kelompok Asuhan Mandiri dengan SK Kepala Desa diwilayah Kerja Puskesmas. Kelompok Asuhan Mandiri adalah kelompok masyarakat yang mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan mengatasi masalah gangguan Kesehatan ringan secara mandiri oleh individu dalam keluarga, kelompok atau masyarakat dengan memanfaatkan Taman Obat Keluarga /TOGA dan akupresur. Kelompok ASMAN yang mendukung program prioritas ada 1 kelompok pada masing-masing wilayah puskesmas. Sementara kelompok ASMAN yang sudah terbentuk 31 Puskesmas (83,7%)
4. Akses sanitasi layak adalah akses terhadap jamban sehat yang mana data di Kabupaten Kediri dari jumlah KK (kepala Keluarga) secara keseluruhan ada 512.329 KK terdapat data Jamban sehat Permanen (JSP) sebesar 79,9% (409.441) KK, Jamban Sehat semi permanen (JSSP) sebesar 14,8% (75.692) KK, Kepala keluarga yang sharing ada 5,3% (27.196) KK.
Pada tanggal 8 Desember Kabupaten Kediri sudah mencapai ODF kabupaten 100% dengan diverifikasi oleh tim Propinsi Jawa Timur.



5. Tingkatan tatanan dalam kabupaten sehat tahun 2023 sudah dalam kategori 26 tatanan.

6. Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar

Pelayanan ANC Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 21 Tahun 2021 ini adalah Pelayanan Kesehatan Masa Hamil yang kemudian disebut pelayanan antenatal (ANC) terpadu adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga sebelum mulainya proses persalinan yang komprehensif dan berkualitas.

Tujuan ANC, yaitu Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin, Mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selamat ibu maupun bayi dengan trauma seminimal mungkin, Meningkatkan serta mempertahankan kesehatan fisik, mental, sosial ibu dan janin, Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan pemberian

ASI Eksklusif, Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal, Menurunkan angka kesakitan,

Sesuai Standart Pelayanan Minimal yang sudah ditetapkan pemerintah maka Pelayanan Antenatal Care diupayakan agar memenuhi standar kualitas, yaitu :

- 1) Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan;
- 2) Pengukuran tekanan darah;
- 3) Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA);
- 4) Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri);
- 5) Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toxoid sesuai status imunisasi;
- 6) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
- 7) Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ);
- 8) Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk Keluarga Berencana);
- 9) Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya);
- 10) Tatalaksana kasus. Ditambah Pelayanan USG

Pengertian pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan selama masa kehamilannya, dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam standar pelayanan kebidanan. Antenatal Care (ANC) yang berkualitas sesuai standar yang telah ditentukan oleh Pemerintah yaitu 1 kali dalam trimester I, 1 kali trimester II dan 2 kali trimester III untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dengan pelayanan ANC berkualitas 10 T. Pelayanan antenatal terpadu adalah pelayanan antenatal komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil. Setiap kehamilan dalam perkembangannya mempunyai risiko mengalami penyulit dan komplikasi oleh karena itu

pelayanan antenatal harus dilakukan secara rutin, terpadu dan sesuai standar pelayanan antenatal

yang berkualitas.

Upaya yang dilakuakn untuk pencapaian hasil yang maksimal di pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar anatar lain :

- a. Meningkatkan Kepedulian masyarakat melalui program Peduli Keluarga
 - b. Mengaktifkan Desa P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi).
 - c. Swiping Ibu hamil oleh petugas ditingkatkan
 - d. Meningkatkan jejaring dengan Fankes diwilayah kerja Puskesmas
7. Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin di Fasilitas Kesehatan adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi Standar pelayanan persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan. Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standart. Capaian Kegiatan sebesar 80,54% .
- Tindak lanjut yang akan dilaksanakan di tahun mendatang guna pencapaian hasil yang maksimal :
- a. Meningkatkan Jejaring Faskes diwilayah kerja Puskesmas
 - b. Mengoptimalkan Peran Dokter Pj KIA
 - c. Mengoptimalkan e-kohort
 - d. Mengoptimalkan drill emergency

8. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Cakupan Pelayanan kesehatan Bayi Baru lahir sebagai salah satu indikator program Kesehatan. Neonatal Lengkap : Pelayanan kunjungan neonatal lengkap, minimal 3 kali yaitu 1 kali pada usia 6 - 48 jam, 1 kali pada 3 - 7 hari, dan 1 kali pada 8 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial dengan menggunakan pendekatan MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda) di satu wilayah kerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar.

Dengan capaian 100%.

Upaya yang dilakukan untuk terus mempertahankan capaian layanan ini antara lain :

- a. Swiping pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir
- b. Meningkatkan pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat ttg kesehatan Bayi Baru Lahir sehingga dimanapun berada untuk memeriksakan bayinya.
- c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat menggunakan buku KIA

9. Pelayanan Kesehatan Balita

Realisasi saat ini sudah 97,92% Pelayanan kesehatan balita di Kabupaten Kediri sudah terlayani sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM. Pelayanan kesehatan, meliputi : a) Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun b) Pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun. c) Pemberian imunisasi dasar lengkap.

Salah satu kendala didalam pelayanan Kesehatan Balita adalah masih adanya batasan pelayanan Kesehatan Balita. Beberapa Posyandu tidak buka pada bulan Januari dan Pebruari.

Untuk meningkatkan Pelayanan Kesehatan Balita dilakukan upaya antara lain :

1. Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Balita
 2. Bekerja sama dengan promkes dalam menyusun juknis Pelayanan Posyandu berikut payung hukumnya
 3. Kunjungan rumah pada balita yang berisiko
 4. Meningkatkan Kerjasama dengan Guru TK dan PAUD dalam pemantauan
 5. Melatih guru TK dan PAUD dalam pelaksanaan SDIDTK
 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ke Posyandu
 7. Monitoring evaluasi kegiatan posyandu sesuai SE Bupati
10. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan penjarangan kesehatan kepada anak usia pendidikan dasar di wilayah kabupaten/kota tersebut pada waktu kelas 1 dan kelas 7. Standar pelayanan penjarangan kesehatan adalah pelayanan yang meliputi : a) Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia); b) Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas); c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut; d) Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen; e) Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala;

Untuk pencapaian Skrening Pelayanan Usia Pendidikan dasar didapatkan capaian 97,9%. Hal ini disebabkan oleh karena siswa baru masuk sekolah pada bulan Juni.

Upaya yang dilakukan untuk tetap meningkatkan capaian indikator kinerja Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar yaitu :

1. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kemenag dan lintas sektor
2. Skrening dilakukan melalui Aplikasi

3. Mempersilahkan anak yang tidak masuk ketika diskriming untuk dilayani di Puskesmas, Posyandu dengan metode daring
 4. Mengatur Jadwal sehingga tidak berbenturan
11. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- Indikator Wanita Usia Produktif yang terscreening sesuai standart selama periode 3 tahun mengalami kenaikan dari 40% di tahun 2021 naik menjadi 44% di tahun 2022 dan di tahun 2023 naik menjadi 90,23%. Kenaikan ini dikarenakan Posbindu sudah mulai aktif setelah masa pandemi, selain itu sosialisasi kepada masyarakat, review kader Posbindu dan kader bindu pada anak sekolah lebih maksimal walaupun belum mencapai target yang diharapkan.
- Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kondisi di atas yaitu dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya deteksi dini untuk melakukan screening usia 15 s/d 59 tahun
12. Desa yang Melaksanakan Posbindu
- Indikator desa yang melaksanakan Posbindu selama kurun waktu 3 tahun sudah mencapai target (100%) dikarenakan kebutuhan prasarana Posbindu KIT yg belum dapat alokasi dari dinas kesehatan telah dicukupi oleh Desa.
13. Sekolah yang Melaksanakan KTR
- Indikator Sekolah yang melaksanakan KTR selama 3 tahun belum dapat memenu target sebesar 100%, meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan. Ditahun 2021 capaian hanya 70% kemudian ditahun 2022 naik menjadi 80% dan ditahun 2023 mencapai 86,4%. Sebagai upaya untuk memenuhi target sekolah KTR dilakukan salah satunya sosialisai kegiatan tentang bahaya merokok dan adanya komitmen KTR di beberapa kecamatan yang ada di wilayah Kab Kediri guna untuk mendukung Perda KTR yang masih berada dalam pembahasan dibidang hukum.
14. Wanita Usia Subur yang Melakukan deteksi dini penyakit kanker payudara dan kanker leher rahim pada usia 30-50 tahun.

Indikator Wanita Usia Subur yang melaksanakan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim selama 3 tahun mengalami penurunan pada tahun 2021 dikarenakan masih masa pandemi sehingga WUS yang mau screening IVA masih belum berani datang ke Puskesmas, Screening IVA mengalami kenaikan pada tahun 2022 karena masa pandemi sudah berakhir, sosialisasi tentang IVA sudah digiatkan kembali, selain itu dapat alokasi 5 IVA Kit yang di alokasikan ke Puskesmas untuk menunjang peningkatan sasaran dari Screening IVA, walaupun masih jauh dari target yang di harapkan (16%)

15. Usia Lanjut Yang Mendapat Skrining

Banyaknya usia Lanjut yang tidak diperkenankan melakukan aktifitas diluar rumah menyebabkan pelayanan kesehatan hanya terealisasi capaian 74 %

Pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar adalah : a) Dilakukan sesuai kewenangan oleh : (1) Dokter; (2) Bidan; (3) Perawat; (4) Nutrisionis/Tenaga Gizi; (5) Kader Posyandu lansia/Posbindu b) Pelayanan skrining kesehatan diberikan di Puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia, bekerja sama dengan pemerintah daerah. c) Pelayanan skrining kesehatan minimal dilakukan sekali setahun. d) Lingkup skrining adalah sebagai berikut : (1) Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah. (2) Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah. (3) Deteksi kadar kolesterol dalam darah (4) Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan Mini Cog atau Mini Mental Status Examination (MMSE)/Test Mental Mini atau Abreviated Mental Test (AMT) dan Geriatric Depression Scale (GDS).

Saat ini capaian belum memenuhi target yang diharapkan yaitu sebanyak 77,3% . Hal ini disebabkan Partisipasi Masyarakat kurang. Pengunjung Posyandu Lansia kebanyakan Perempuan Namun sudah lebih tinggi dari target yang ditentukan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator di atas antara lain :

- a. Meningkatkan Kerjasama dengan BPMPD dan Bapeda untuk sosialisasi dana Desa peruntukan Posyandu Lansia
- b. Sosialisasi Kesehatan Usia Lanjut sesuai SE Bupati

16. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Indikator Penderita HT ditangani sesuai standart selama kurun waktu 3 tahun ada kenaikan dari capaian 26% ditahun 2021 naik menjadi 40% ditahun 2022 dan menjadi 90,23% ditahun 202. Kenaikan capaian ini karena masa pandemi sudah berakhir sehingga masyarakat yg sudah terscreening di Posbindu sudah mau datang ke tempat pelayanan Kesehatan (Puskesmas, RS Negeri maupun Swasta serta Klinik Pratama).

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator di atas antara lain :

1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang Penyakit Tidak Menular khususnya Hipertensi dan pentingnya deteksi dini untuk melakukan screening usia 15 s.d 59 tahun
2. Memaksimalkan jejaring yang ada di wilayah Kab Kediri untuk meningkatkan cakupan HT
3. Advokasi kepada desa supaya bisa membantu dalam pengembangan terbentuknya posbindu dan ikut memfasilitasi sarana prasarana terutama pengadaan BMHP karena Kabupaten hanya bisa menyediakan 25 % dari sasaran 100 % dan bisa menggerakkan masyarakat untuk deteksi dini Penyakit tidak Menular sesuai standart terutama untuk bahan habis pakai berupa pengadaan Gula Darah.
4. Refresing kader Posbindu yang sudah ataupun belum terbentuk
5. Monitoring pelaksanaan Posbindu di desa maupun Posbindu Satker yang ada di desa

17. Pelayanan kesehatan penderita DM

Indikator Penderita DM ditangani sesuai standar selama 3 tahun capaian sasaran mengalami kenaikan hal ini dikarenakan Posbindu sudah mulai aktif kembali, sehingga masyarakat terdeteksi secara dini di Posbindu mau datang ke Fasilitas Kesehatan untuk penanganan lebih lanjut.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator di atas antara lain :

1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang Penyakit Tidak Menular khususnya DM dan pentingnya deteksi dini untuk melakukan screening usia 15 s/d 59 tahun
2. Advokasi kepada desa supaya bisa membantu dalam pengembangan posbindu dan ikut memfasilitasi sarana prasarana kegiatan Posbindu dan bisa menggerakkan masyarakat untuk deteksi dini Penyakit tidak Menular sesuai standart terutama untuk bahan habis pakai berupa Gula Darah.
3. Refresing kader Posbindu yang sudah ataupun belum terbentuk .
4. Monitoring pelaksanaan Posbindu di desa maupun Posbindu Satker yang ada di desa

18. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

Presentase ODGJ berat yang ditangani sesuai standart sudah mencapai target 100 % hal ini dikarenakan sosialisasi kepada Masyarakat dan Lintas sektor tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa sudah berjalan dengan Baik sehingga kalau menemukan kasus ODGJ di masyarakat segera dilaporkan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Di Kabupaten Kediri masih ada ODGJ berat yang di pasung sejumlah 28 Orang Kab Kediri belum bebas pasung hal ini dikarenakan ada beberapa kendala yang ada, terutama faktor keluarga yang tidak boleh membebaskan odgj yang di pasung. Selain itu stigma tentang ODGJ Pasung di masyarakat masih tinggi,

Masyarakat sekitar penderita pasung belum bisa menerima sehingga akan terjadi repasung.

Langkah langkah tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pencapaian indikator ini antara lain :

- 1) Mengoptimalkan TPKJM (Tim Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat) di tingkat Kabupaten
 - 2) Sosialisasi tentang program jiwa dan bebas pasung kepada lintas sektor tingkat kecamatan dan tingkat desa.
 - 3) Sosialisasi tentang program jiwa kepada keluarga penderita supaya bisa memahami pentingnya pengobatan rutin kepada penderita ODGJ dan cara membersihkan dan merawat diri pada penderita.
 - 4) Penggunaan dana desa untuk memfasilitasi pembiayaan rujukan dan bantuan permakanan pada penderita ODGJ berat.
19. Capaian kinerja program TB untuk penemuan dan penanganan kasus TB sudah sebesar 100%. Untuk meningkatkan capaian ini dengan melakukan penyisiran data pada rumah sakit dan klinik dan juga upaya Investigasi Kontak (IK) dengan melibatkan semua sector dan komponen masyarakat penggiat program TBC yang lebih intensif di Puskesmas. Selain itu meningkatkan Advokasi kepada pelayanan kesehatan swasta, terutama Dokter Praktek Swasta untuk turut berpartisipasi dalam pelaporan atas penyakit menular yang dilayani, utamanya untuk penyakit TB kepada Puskesmas setempat untuk diteruskan ke Dinas Kesehatan.
20. Indikator orang beresiko yang mendapat pemeriksaan HIV mencapai 83 %, hal ini dilakukan dengan memperbanyak layanan tes HIV, sedangkan indikator Penderita HIV yang mengakses layanan CST mencapai sebesar 87 %. Untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut dengan menambah layanan CST dan konseling terhadap ODHA untuk akses layanan CST serta layanan pengobatan ARV.

21. Pelayanan kesehatan gizi masyarakat

Bulan februari dan agustus adalah bulan vitamin A. Di kedua bulan ini anak bisa mendapatkan suplementasi vitamin A kapsul biru (dosis 100.000IU) untuk bayi umur 6-11 bulan dan kapsul merah (dosis 200.000 IU) untuk anak umur 12-59 bulan.

Manfaat pemberian vit A untuk anak :

Vitamin A/retinol terlibat dalam pembentukan, produksi, dan pembentukan sel darah merah, sel limfosit, antibodi juga integritas sel epitel pelapis tubuh. Adapun vit A juga bisa mencegah rabun senja, xeroftalmia, kerusakan kornea dan kebutaan serta mencegah anemia pada ibu nifas. Jika anak kekurangan vit A maka anak bisa rentan terserang penyakit infeksi seperti infeksi saluran pernapasan atas, campak dan diare, Capaian vit A sebanyak 92,2%.

22. Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga

Jumlah Pos UKK yang terbentuk adalah jumlah kegiatan pembentukan pos usaha kesehatan kerja puskesmas yang ada dikelompok masyarakat pekerja. Target sasaran kinerja adalah sebesar 42 pos Puskesmas sudah membentuk Posk UKK dengan capaian kinerja adalah sebesar 65 pos UKK di 30 Puskesmas dan dari 44 Pos UKK tersebut yang sudah terlegalisasi / sudah ada SK nya. Capaian indikator jamah haji yang diukur kebugarannya tahun 2023 sebesar 100%, sesuai target yang ditetapkan.

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan olah raga adalah jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan olah raga seperti tes kebugaran haji, posbindu maupun tes kebugaran di instansi yang terkait. Target sasaran kinerja adalah 37 Puskesmas dan capaian kinerja adalah bahwa semua puskesmas (37) sudah melaksanakan kesehatan olah raga secara rutin, minimal 2 (dua) kali tes kebugaran haji yaitu haji yang akan berangkat tahun bersangkutan dan tes kebugaran haji untuk tahun depan. Dan sudah semua puskesmas yang melaksanakan tes kebugaran di posbindu,

lingkungan puskesmas dan siswa-siswa sekolah baik tingkat sekolah dasar maupun tingkat SLTP.

Jumlah fasyankes di Kabupaten Kediri yaitu Puskesmas ada 37 Fasyankes dan dengan capaian dan setiap fasyankes wajib melaksanakan K3. Target K3 adalah 6 saat ini program K3 yang sudah terealisasi sudah menyeluruh ke 37 fasyankes.

Selain fasyankes dalam bidang perkantoran juga menerapkan K3. Jumlah target perkantoran yang melaksanakan K3 sebanyak target 2, sedangkan dalam realisasinya sudah mencapai 33 perkantoran yang menerapkan tapi utk yg lain belum ada SK Timnya sedangkan yang 4 perkantoran sudah memiliki SK Tim K3..

Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) merupakan salah satu upaya pemerintah, masyarakat, maupun pemberi kerja dan serikat pekerja untuk menggalang dan berperan serta guna meningkatkan kepedulian dan mewujudkan upaya memperbaiki kesehatan pekerja perempuan sehingga meningkatkan produktivitas kerja. Dalam hal ini jumlah perusahaan yang melaksanakan GP2SP adalah target 2 Perusahaan sedangkan yang sudah terealisasi sebanyak 4 perusahaan .

Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan layanan di atas dengan cara :

- 1)Advokasi kepada lintas sektor dan program serta desa dalam membantu pengembangan kesehatan kerja dan olah raga yang ada di wilayah.
- 2)Pengadaan sarana prasarana peralatan pemeriksaan kesehatan kerja baik di lingkungan puskesmas maupun di luar puskesmas yaitu Pos UKK dan untuk kesehatan olah raga (tes kebugaran kit).
- 3)Meningkatkan SDM petugas Puskesmas (pengelola kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga).
- 4)Advokasi kepada pemangku kebijakan dan camat tentang pelaksanaan kabupaten sehat.

5) Peningkatan pelatihan wira usaha sanitasi (Wusan) di lingkungan masyarakat untuk menambah desa yang ODF

23. Pelayanan kesehatan lingkungan

Presentase TPP yang memenuhi syarat di Kabupaten Kediri dengan target yang memenuhi syarat 72 % dari jumlah TPP yang ada di Kabupaten Kediri adalah 1149 . Dari jumlah TPP tersebut dilakukan inspeksi sanitasi, sosialisasi dan penyuluhan hygiene sanitasi dengan total capaian sasaran kinerja sudah ada 843 (87,55 %). Yaitu sudah banyak yang TPP yang memenuhi syarat hanya saja masih diperlukan sosialisasi untuk pengurusan sertifikat laik sehatnya, dari yang memenuhi syarat ada yang belum bersertifikat 94,6% dan yang sudah memiliki sertifikat masih 5,4%. Untuk TPP yang belum memenuhi syarat masih ada 110(12,12%)..

Persentase desa ODF (Open defecation free) adalah desa yang seluruh masyarakatnya sudah mengakses buang air besarnya ke jamban sehat. Target sasaran adalah 100% dari 344 desa dan capaian kinerja semua desa sudah ODF di tahun 2023 (100%) yang akan dideklarasikan oleh bupati sebagai desa ODF pada awal tahun 2024 ini.

Verifikasi ODF tahun 2023 ini dilakukan oleh tim tingkat Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten Kediri dinyatakan bahwa Kabupaten Kediri lolos dan mendapat penghargaan Kabupaten ODF .

Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas airnya realisasi capaian kinerja sebesar 85% dari target yang ditetapkan sebesar 83%. Kabupaten Kediri masih kurang data dan informasi yang terkait pencapaian kualitas air minum dan belum maksimalnya kegiatan pengawasan kualitas air minum (PKAM) baik pengawasan eksternal/internal sehingga perlu dilakukan studi Kualitas Air minum (SKAM) yang dapat digunakan sebagai baseline data kualitas air minum rumah tangga di Kabupaten Kediri serta data dasar dalam melakukan PKAM. SKAMRT ini akan dilanjutkan dengan kegiatan rutin melalui kegiatan Surveilans Kualitas Air Minum. Data yang

dihasilkan juga dapat dipakai untuk intervensi pengelolaan air minum di tingkat rumah tangga serta intervensi kasus stunting.

Kegiatan SKAMRT dilaksanakan di Kabupaten Kediri di seluruh Puskesmas Se Kabupaten Kediri dengan total responden adalah 37 Puskesmas x 2 desa x 8 responden = 592 responden dengan enumerator dari tenaga sanitarian di Puskesmas sebanyak 74 orang dan dinas Kesehatan Kabupaten Kediri (sle Kesling) selaku pengawas internal.

Persentase Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sudah 100%. Semua fasyankes (puskesmas, rs, klinik) sudah melaksanakan MOU dengan pihak ke-3 baik limbah padat maupun limbah cair (bagi yang belum memiliki IPAL).

Persentase TTU yang memenuhi syarat memiliki sertifikat laik sehat dengan sasaran kinerja dengan TTU yang diperiksa adalah sarana pendidikan (SD, SLTP, SLTA), sarana kesehatan (Puskesmas, RSU) dan pasar serta Pondok pesantren adalah sebesar 1.178 sarana. dengan target sasaran kinerja adalah sebesar 86 % dari jumlah TTU yang ada yaitu 841 TTU memenuhi syarat. Dengan hasil capaian kinerja sudah 89,43% yaitu banyak dilakukan pembinaan dan pengawasan sehingga menjadi lebih baik.

Jumlah fasyankes di Kabupaten Kediri yaitu Puskesmas ada 37 Fasyankes dan yang melakukan pengelolaan limbah medis dengan target 37 sarana sudah ada 37 Puskesmas yang melakukan pengelolaan limbah medis, untuk Puskesmas yang belum memiliki IPAL sudah ada MUO dengan pihak ketiga demikian juga dengan limbah medis padat juga sudah ada MUO dengan pihak ketiga. Dan Tahun 2023 ini ada pengadaan IPAL di 2 (dua) Puskesmas yaitu Puskesmas puncu dan Sambu .

Gambar IPAL Pengadaan tahun 2023



Rencana tindak lanjut u meningkatkan capaian indikator layanan kesehatan lingkungan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- 1) Advokasi kepada lintas sektor dan program serta desa dalam membantu pengembangan sanitasi dan kesehatan kerja dan olah raga yang ada di wilayah.
 - 2) Peningkatan sosialisasi STBM (Sanitasi Total berbasis Masyarakat) untuk meningkatkan sanitasi di Masyarakat dan Advokasi kepada lintas sektor dan Desa terkait Regulasi STBM di Kabupaten Kediri.
 - 3) Pengadaan sarana prasarana peralatan pemeriksaan kesehatan kerja baik dilingkungan puskesmas maupun diluar puskesmas yaitu Pos UKK dan untuk kesehatan olah raga (tes kebugaran kit).
 - 4) Advokasi kepada pemangku kebijakan dan camat tentang pelaksanaan kabupaten sehat dan membentuk Kecamatan percontohan kecamatan sehat.
 - 5) Advokasi dan sosialisasi secara terus menerus untuk meingkatkan kualitas air minum rumah tangga
 - 6) Meningkatkan SDM petugas Puskesmas (pengelola kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga).
24. Pengelolaan surveilans dan Imunisasi
- Kegiatan surveilans yang dilakukan meliputi penanggulangan KLB (Kejadian Luar Biasa) secepat mungkin atau kurang dai 24 jam. Penanggulangan tersebut bisa terdiri dari beberapa kegiatan yaitu penyelidikan epidemiologi, pengambilan sampel, dan pengiriman sampel. Selain itu juga ada kunjungan Rumah sakit (S A R S) untuk

mendeteksi secara dini kasus KLB yang ada di RS. Kegiatan surveilans juga melaporkan penyakit potensial KLB secara tepat dan tepat. Kemudian juga menerapkan SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Response) rutin setiap minggunya. Mulai dari minggu 1 sampai dengan minggu 52 atau 53 setiap tahun. KLB yang diwaspadai di sub-substansi surveilans dan imunisasi utamanya adalah penyakit-penyakit PD3I (Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi) seperti Campak, AFP, Rubella, dan lain sebagainya. Pada tahun 2020, 2021, dan 2022 pandemi Covid-19 juga termasuk dalam kegiatan yang menjadi tanggung jawab sub-substansi surveilans dan imunisasi.

Kegiatan Imunisasi merupakan usaha memberi kekebalan kepada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin kedalam tubuh agar tubuh membuat zat anti untuk mencegah penyakit tertentu. Posyandu sebagai salah satu tempat pelayanan kesehatan dalam kegiatannya melibatkan partisipasi masyarakat yang dilaksanakan oleh kader-kader kesehatan yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari puskesmas mengenai pelayanan kesehatan dasar. Menurut Permenkes No. 12 Tahun 2017 terdapat istilah Imunisasi Program yaitu imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi Program terdiri atas: a. Imunisasi rutin; b. Imunisasi tambahan; dan c. Imunisasi khusus.

Imunisasi rutin terdiri atas Imunisasi dasar dan Imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar yang dimaksud adalah Imunisasi HB0, BCG, DPT, Polio, PCV, MR, OPV, RV, dan IPV. Sedangkan Imunisasi lanjutan diberikan pada: anak usia bawah dua tahun (Baduta); anak usia sekolah dasar; dan wanita usia subur (WUS). Imunisasi lanjutan yang dimaksud DPT-HB-Hib dan Campak MR.

Selain imunisasi kegiatan lain adalah investigasi KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) yang harus segera dilakukan ketika

menerima laporan dari fasyankes baik puskesmas, klinik, maupun rumah sakit.

Desa UCI adalah Desa/kelurahan dimana 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Jumlah desa yang belum UCI sebanyak 35 desa tersebar di 15 kecamatan yaitu Mojo, Kepung, Pagu, Gurah, Wates, Ringinrejo, Purwoasri, Plemahan, Ngadiluwih, Puncu, Pare, Papar, Ngancar, Plosoklaten, dan Kayen Kidul. Kendala yang dihadapi adalah masih ada kelompok yang menolak imunisasi dan sebagian orangtua menolak diimunisasi ganda. Sehingga beberapa anak tidak mendapatkan imunisasi tepat waktu dan ini mempengaruhi capaian desa UCI.

Indikator pengambilan dan pengiriman spesimen ≤ 24 jam terdiri dari spesimen covid-19 dan spesimen PD3I dan Keracunan Makanan. Untuk spesimen Covid-19 indikator kinerja pengambilan dan pengiriman spesimen ≤ 24 jam dapat tercapai 100% dikarenakan lab pemeriksaan spesimen Covid-19 tersedia di Kabupaten Kediri sehingga seluruh spesimen yang diambil dapat dikirim secara realtime di hari yang sama ke lab pemeriksa. Sedangkan spesimen PD3I dan Keracunan Makanan indikator kinerja pengambilan dan pengiriman spesimen ≤ 24 jam belum mencapai 100% dikarenakan lokasi laboratorium pemeriksa spesimen PD3I dan Keracunan Makanan hanya ada di Surabaya. Sehingga petugas secara periodik mengirimkan spesimen ke Surabaya berdasarkan kasus yang ditemukan. Kendala yang dihadapi adalah tidak setiap saat spesimen dikirimkan secara realtime ke Surabaya dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia (petugas), dan anggaran (perjalanan dinas luar daerah) pengiriman. Meskipun target pengambilan dan pengiriman tidak tercapai tetapi target penemuan kasus non polio AFP dan Dicarded Rate MR Kabupaten Kediri telah tercapai dan mendapat sertifikat penghargaan dari Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan RI.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi KLB adalah:

- a. Bersama dengan forkompimda dan forkompimcam mengevaluasi dan monitoring upaya penanggulangan covid-19 dengan didanai dari APBD
- b. Bersama dengan pihak pihak terkait, dilaksanakan tracing, testing, dan treatment (3T) apabila terjadi kasus di wilayah tersebut dengan didanai dari APBD
- c. Melakukan pengiriman spesimen PD3I dan keracunan makanan ke BBLK Surabaya dengan dana APBD
- d. Melakukan pertemuan dengan petugas surveilans puskesmas dan lintas program untuk mengintensifkan sosialisasi tentang Covid-19 dan penanganannya, mengingat kasus ini adalah kasus baru dengan pendanaan dari APBD
- e. Melakukan pertemuan dengan kontak person RS (5RS) 2 x setahun, dengan dana APBD.
- f. Melaksanakan kunjungan Rumah sakit (SARS) untuk mendeteksi secara dini kasus PD3I yang ada di RS dengan dana APBD.
- g. Melakukan Bimbingan dan Teknis Pada saat terjadi kasus KLB dengan dana APBD
- h. Memberikan rekomendasi dari hasil pengamatan yang dilakukan.
- i. Menggiatkan vaksinasi covid-19 sebagai salah satu upaya penanggulangan covid-19.

Dalam pelaksanaan penanggulangan KLB, masih ada hambatan yang timbul dilapangan anatra lain :

- a. Masih kurangnya pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam penanggulangan KLB (Surveilans Berbasis Masyarakat)
- b. Sosialisasi pengetahuan daqn keterampilan tentang Surveilans Berbasis Masyarakat
- c. Di era digital ini, lebih menggencarkan edujkasi kepada masyarakat tentang pentingnya 3M melalui media sosial, kerjasam dengan satgas Desa dan pihak pihak lain yang terkait

Rencana kegiatan yang akan dilakukan:

- a. Peningkatan dan mempertahankan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata
- b. Sosialisasi Pengetahuan dan keterampilan tentang Surveilans berbasis masyarakat
- c. Di era digital ini, lebih mengencarkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya 3M melalui Media Sosial, kerjasama dengan Satgas Desa dan pihak lain yang terkait.

Indikator Persentase ketepatan dan kelengkapan laporan penyakit potensial KLB (minggu 1 s/d minggu 52) dengan target 80% dan terealisasi 38 faskes yang tepat dan lengkap dalam pelaporan dan 3 faskes yang belum mencapai 80% sehingga capainnya sebesar 96,94%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa seluruh Puskesmas telah melakukan pelaporan penyakit potensial KLB dengan tepat dan lengkap, sedangkan Rumah Sakit masih belum melaporkan dengan tepat dan lengkap. Hal ini didukung karena laporan ini rutin dilakukan oleh petugas surveilans puskesmas, setiap hari senin sebelum jam 12.00 WIB. Apabila ditemukan kendala masih ada waktu untuk berkoordinasi dengan pengelola kabupaten melalui web Sistem Kewaspadaan Dini Respon. Selain itu, penggunaan media sosial, sangat mendukung dalam koordinasi tentang sistem kewaspadaan pihak puskesmas dengan pengelola kabupaten. Khusus untuk faskes selain puskesmas perlu monitoring mingguan agar laporan bisa disampaikan lengkap dan tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan.

Langkah langkah yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja surveilans dan imunisasi adalah :

- a. Memonitoring microplaning imunisasi masing-masing puskesmas sekaligus mengkaji matriks kegiatan imunisasi puskesmas selama satu tahun

- b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petugas kesehatan terutama bidan koordinator dan bidan desa tentang keamanan imunisasi ganda
- c. Akselerasi imunisasi bagi bayi dan balita yang belum mendapatkan imunisasi lengkap
- d. Advokasi ke pihak terkait (Dinas Kesehatan Propinsi) dalam kecukupan penyediaan baik vaksin maupun logistik
- e. Kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor dalam percepatan akselerasi imunisasi bagi bayi dan balita
- f. Edukasi dan komunikasi tentang keamanan dan manfaat vaksin bagi kelompok – kelompok antivaksin
- g. Melakukan validasi data imunisasi
- h. Monitoring dan evaluasi pelaporan PD3I secara kontinyu
- i. Monitoring ketepatan dan kelengkapan laporan sistem kewaspadaan dini respon penyakit potensial KLB
- j. Mendatangkan pakar/ahli terkait PD3I untuk berdiskusi dengan dokter dan pihak terkait di RS Kabupaten Kediri untuk membantu mengidentifikasi kasus kasus yang masuk kategori suspect PD3I
- k. Peningkatan kapasitas petugas surveilans dalam tata laksana kasus PD3I dan keracunan makanan

25. Layanan Kesehatan Penyakit Menular

- a. Untuk pencegahan dan pengendalian kusta, indikator penemuan kusta pada anak sebesar 4%, RFT MB sebesar 92% dan RFT PB sebesar 100%. Sedangkan untuk indikator cacat pada kasus kusta baru ditargetkan < 5%, tetapi ditemukan kasus cacat sebesar 20%. Hal ini terjadi karena keterlambatan sebagai akibat masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang kusta disamping faktor malu pada keluarga untuk mengakui adanya anggota keluarga yang menderita penyakit kusta, masih ada kusta yang disembunyikan dan ditemukan dalam keadaan sudah terlambat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kondisi di atas anatar lain dengan Peningkatan informasi tentang penyakit kusta, baik melalui

media cetak ataupun elektronik serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit kusta, sehingga diharapkan penemuan kasus kusta baru tidak terlambat untuk menghindari terjadinya kecacatan, termasuk pada kader, guru UKS dan petugas kesehatan.

- b. Pencegahan dan pengendalian Diare, capaian kinerja program diare untuk kasus diare pada semua umur tercapai 21,3 %, sedangkan untuk penemuan kasus diare pada balita 21,9 %. Kedua indikator tersebut belum bisa tercapai dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh semakin pahamnya masyarakat tentang penyakit diare, sehingga beberapa kasus dilakukan pengobatan secara mandiri. Disamping itu, untuk kasus-kasus diare pada balita sebagian besar dibawa kepada pelayanan dokter praktek swasta dan dapat dikatakan bahwa semua dokter praktek swasta tidak memberikan laporan.
- c. Program hepatitis dengan indikator pemeriksaan HBSAg mencapai kinerja cukup baik yaitu 100%, hal ini karena dukungan terhadap pemeriksaan hepatitis sudah tersedia dengan baik reagen maupun pelayanan ANC untuk pemeriksaan Hepatitis bagi ibu hamil di Puskesmas sudah berjalan dengan baik. Namun masih perlu ditingkatkan lagi agar mencapai kinerja yang maksimal dengan cara Peningkatan ketersediaan reagen untuk pemeriksaan HbsAg pada ibu hamil sebagai deteksi atas penyakit Hepatitis dan koordinasi dengan lintas program untuk peningkatan capaian kinerja tersebut dan peningkatan jejaring layanan dengan fasyankes yang lain .
- d. Pada program P2 DBD didapatkan indikator kinerja pada setiap kasus DBD telah ditangani sesuai standard sebesar 100% sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan Indikator Angka Bebas Jentik mencapai 85 %. Hal ini perlu ditingkatkan sebagai upaya pencegahan demam berdarah dengan mengefektifkan kegiatan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J).

Dari hasil analisa di atas upaya yang dilakukan yaitu Peningkatan informasi tentang penyakit DBD dengan utamanya kegiatan PSN dengan pendekatan gerakan 1 rumah 1 jumantik (G1R1J) sebagai upaya untuk peningkatan angka bebas jentik dengan tujuan untuk mencegah demam berdarah. Dan peningkatan penyediaan logistik surveilans DBD agar dapat segera ditangani sehingga menurunkan resiko timbulnya kematian.

e. P2 Kecacingan. Hampir semua anak usia 1 – 12 tahun telah diberi obat cacing, yakni 100 %.

f. P2 Filariasis

Tidak ditemukan kasus baru filariasis di Kabupaten Kediri.

Dari hasil evaluasi dan analisa di atas, beberapa langkah akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi kepada pelayanan kesehatan swasta, terutama Dokter Praktek Swasta untuk turut berpartisipasi dalam pelaporan atas penyakit menular yang dilayani, utamanya untuk penyakit, TB, Diare dan ISPA kepada Puskesmas setempat untuk diteruskan ke Dinas Kesehatan.
2. Peningkatan ketersediaan reagen untuk pemeriksaan HbsAg pada ibu hamil sebagai deteksi atas penyakit Hepatitis dan koordinasi dengan lintas program untuk peningkatan capaian kinerja tersebut dan peningkatan jejaring layanan dengan fasyankes yang lain .
3. Peningkatan informasi tentang penyakit kusta, baik melalui media cetak ataupun elektronik serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit kusta, sehingga diharapkan penemuan kasus kusta baru tidak terlambat untuk menghindari terjadinya kecacatan, termasuk pada kader, guru UKS dan petugas kesehatan.
4. Peningkatan informasi tentang penyakit DBD dengan utamanya kegiatan PSN dengan pendekatan gerakan 1 rumah 1 jumantik (G1R1J) sebagai upaya untuk peningkatan angka bebas jentik

dengan tujuan untuk mencegah demam berdarah. Dan peningkatan penyediaan logistik surveilans DBD agar dapat segera ditangani sehingga menurunkan resiko timbulnya kematian.

5. Untuk Program HIV sebagai upaya untuk meningkatkan akses layanan CST dengan menambah layanan tes HIV dan juga layanan pengobatan ARV.

26. Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat

Indikator Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yaitu Persentase UHC Kabupaten realisasinya sebesar 96,00 % melebihi target sebesar 74%. Sebanyak 1.607.772 jiwa dengan segmen kepesertaan PBIN sebanyak 801.252 jiwa, PBID sebanyak 296.483 jiwa, BP sebanyak 34.585 jiwa, PBPU sebanyak 187.536 jiwa, PPU BU sebanyak 222.002 jiwa dan PPU PN sebanyak 65.914 jiwa.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen dari lintas sector dan semua pihak yang ada dalam Tim Percepatan UHC untuk berperan sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya masing-masing.

Target UHC (Universal Health Coverage) Tahun 2023 telah mencapai 96% dari 74% target atau sebanyak 1.607.772 jiwa telah memiliki jaminan kesehatan. Dari 1.674.818 jiwa penduduk Kabupaten Kediri sebesar 65,54% termasuk segmen kepesertaan PBI (Penerima Bantuan Iuran) baik PBIN maupun PBID. Hal ini menjadi disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri secara mandiri menjadi peserta JKN. Juga masih kurangnya peran pihak pemberi kerja untuk mendaftarkan karyawannya menjadi peserta JKN.

Komposisi kepesertaan JKN saat ini yaitu 65,54% adalah peserta PBI atau Penerima Bantuan Iuran (baik PBIN maupun PBID) Kesadaran masyarakat dan pihak swasta sebagai pemberi kerja masih kurang untuk mendaftarkan anggota keluarganya ataupun karyawannya dalam kepesertaan JKN non PBI (Penerima Bantuan Iuran).

Pentingnya updating (pemutakhiran) data kependudukan secara berkala belum menjadi perhatian masyarakat. Sehingga setiap perubahan data kependudukan (kelahiran, kematian, pernikahan, pindah domisili dll) tidak terekam dengan baik.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan program jaminan kesehatan antara lain :

- a. Meningkatkan kerja sama lintas program dan lintas sektor dalam peningkatan pelayanan dan pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- b. Melakukan monitoring pencapaian target indikator Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) puskesmas serta optimalisasi pemanfaatan dana kapitasi untuk peningkatan pelayanan.
- c. Komitmen semua pihak untuk mempertahankan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Kediri perlu dijaga agar semua warga Kabupaten Kediri memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial.
- d. Perlu juga meluruskan kesalahpahaman dalam mengartikan UHC yang selama ini bahwa bila seluruh penduduk telah menjadi peserta JKN maka cakupan Kesehatan semesta dianggap tercapai. Padahal terdapat hal yang lebih kompleks dari sekedar kepesertaan jaminan pembiayaan Kesehatan, namun juga berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

27. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

Kabupaten Sehat adalah kota atau kabupaten suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah kota. Pelaksanaan Kabupaten sehat di Kabupaten Kediri sudah berjalan sejak tahun 2014 dan tahun 2023 mengikuti verifikasi kabupaten sehat tingkat Propinsi dan dinyatakan lolos untuk kategori

“SWASTI SABA PADAPA”. Dan untuk capaian Persentase Kabupaten Sehat dari 26 Kecamatan sudah 26 Kecamatan (100%) mengikuti Kabupaten sehat.

28. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
 Jumlah Puskesmas yang terakreditasi sampai dengan tahun 2023 sudah mencapai target yaitu sebesar 35 puskesmas. Sedangkan Puskesmas dengan Kelulusan Akreditasi Minimal Utama sebanyak 34 puskesmas dengan status akreditasi 34 puskesmas paripurna dan 1 puskesmas masih menunggu hasil.

C. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi terdiri atas 2 Sub Kegiatan yaitu :

1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
2. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Realisasi indikator kinerja pada tahun 2023 akan disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja program	Target 2023	Realisasi 2023	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan mutu kualitas pelayanan kesehatan	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	Tingkat ketersediaan sistem informasi kesehatan	37 puskesmas	37 puskesmas	100,00%
	Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama	Jumlah dokumen informasi yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100,00%
		Jumlah LAN yang terpelihara	2 jaringan 37 pkm	2 jaringan 37 pkm	100,00%

		dan puskesmas yang menggunakan simpus dan e-SPM			
--	--	---	--	--	--

D. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah

Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah terdiri atas 2 Sub Kegiatan yaitu :

1. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
2. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Realisasi capaian indikator kinerja pada tahun 2021 akan disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja program	Target 2023	Realisasi 2023	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan mutu kualitas pelayanan kesehatan	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan	100%	100%	100,00%
	Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama	Persentase Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik ($\geq 89\%$)	16,2%	91,89%	567%
		Persentase keluarga yang mendapat intervensi	15%	97,59%	650,6%

	Persentase Klinik Pratama yg terakreditasi	20%	58,82%	294,1%
	Persentase RS yang terakreditasi paripurna	36,36%	90,90%	250%
	Persentase Klinik Utama yang terakreditasi	0%	40%	0,00%
	Persentase lab Madya yang terakreditasi	0%	0%	0,00%
	Jumlah Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik ($\geq 89\%$)	6 puskesmas	34 puskesmas	566,67%
	Jumlah keluarga yang mendapat intervensi sesuai hasil survey KS	40.365 keluarga	458.236 keluarga	1135%
	Jumlah Klinik Pratama yg Terakreditasi	0 klinik	0	0,00%
	Jumlah RS yang terakreditasi paripurna	4	10	250%
	Jumlah Klinik Utama yang terakreditasi	0	0	0,00%
	Jumlah lab Madya yang terakreditasi	0	0	0,00%

2) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia didukung oleh 3 kegiatan yaitu 1). Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten/kota, 2) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, 3) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Masing masing kegiatan mempunyai sub kegiatan yang menjabarkan pelaksanaan program kegiatan.

Realisasi indikator kinerja program pada tahun 2023 akan disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja program	Target 2023	Realisasi 2023	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan mutu kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama	Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan	100%	100%	100%

A. Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota

Kegiatan Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota terdiri atas 2 Sub Kegiatan yaitu : 1) Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan; dan 2) Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Realisasi indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 akan disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja program	Target 2023	Realisasi 2023	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan	Persentase fasilitas	Jumlah ijin praktik yang	1250	2241	179,28%

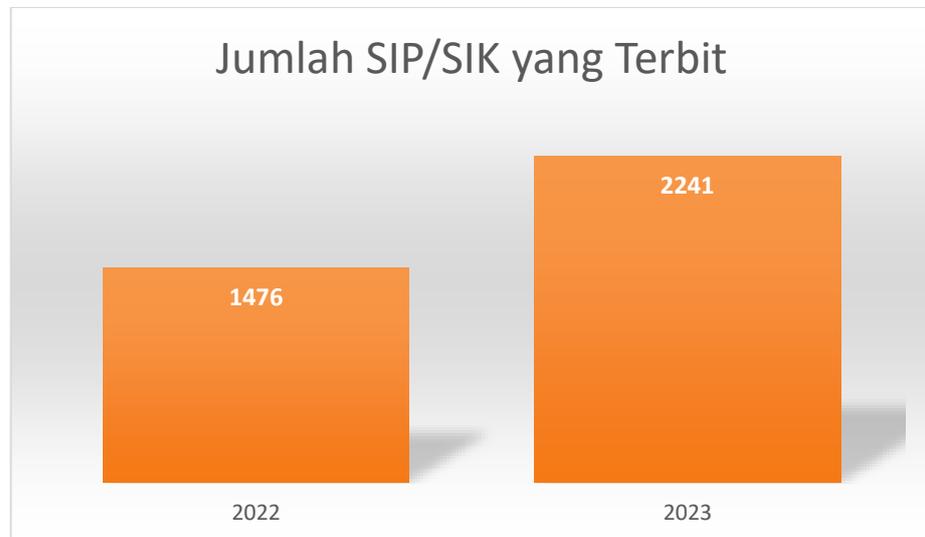
mutu kualitas pelayanan kesehatan	kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama	diterbitkan setelah memenuhi persyaratan			
		Perizinan praktek tenaga kesehatan terkendali	100%	100%	100,00%
		Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui faskes dan organisasi profesi	100%	100%	100,00%

Capaian indikator kinerja tahun 2023 dari tabel di atas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Terasilinasinya pemberian izin praktik/kerja tenaga kesehatan yang telah memenuhi kompetensi

Beberapa tenaga kesehatan memerlukan surat ijin praktik/kerja dalam melakukan pekerjaannya. Dalam tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri melalui seksi Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Kesehatan telah menerbitkan 2241 surat ijin praktik/kerja yaitu melebihi target 1250 surat ijin praktik/kerja.

Surat ijin praktik/kerja tenaga kesehatan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2022 dan 2023



Sumber : Data SIP/ SIK Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2022 dan 2023

- b. Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan

Pada tahun 2023 Dinas Kesehatan kabupaten Kediri mengadakan kegiatan kredensial tenaga kesehatan Puskesmas, profesi yang harus mengikuti kredensial adalah profesi dokter, dokter gigi, perawat dan bidan. Tujuan dari kredensial nakes Puskesmas adalah memastikan agar setiap pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga yang kompeten sehingga mutu pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien dan masyarakat di Puskesmas lebih terjamin dan terlindungi. Tenaga kesehatan yang telah mengikuti kegiatan kredensial sejumlah 580 orang, dengan hasil kredensial 97% direkomendasikan dan 3% direkomendasikan dengan catatan.

B. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota terdiri atas 2 Sub

Kegiatan yaitu : 1) Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan; 2) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Realisasi indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 akan disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja program	Target 2023	Realisasi 2023	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan mutu kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama	Tersedianya perencanaan SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah	100%	100%	100,00%
		Tersedianya dokumen penyusunan perencanaan kebutuhan SDM di Faskes Pemerintahan	100%	100%	100,00%
		Terpenuhinya 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar di Puskesmas	100%	100%	100,00%
		Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan SDM di Faskes Pemerintahan	100%	100%	100,00%

Uraian capaian kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Terlaksananya perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan

Penyusunan rencana kebutuhan dan pendayagunaan SDM dalam satu tahun yaitu 2023 telah disusun dengan baik menjadi 1 (satu) dokumen laporan rencana kebutuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan di Kabupaten Kediri.

- b. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan

Program internsip dokter Indonesia di Kabupaten Kediri terdapat pada 4 (empat) wahana yaitu RS HVA Toelongsredjo, RSKK, RS Siti Khodijah, RS Aura Syifa. Berdasarkan Keputusan Kepala BPPSDMK Nomor HK.02.02./I/10489/2021 tentang Dispensasi Waktu Penempatan Program Internsip Dokter Indonesia Tahun 2021 bahwa pelaksanaan waktu penempatan program internsip pada tahun 2021 paling lama adalah 9 bulan yang terbagi dalam rotasi waktu yaitu 3 bulan di Rumah Sakit, 3 bulan di Puskesmas Utama (Puskesmas Kandangan, Puskesmas Ngadiluwih, Puskesmas Mojo, Puskesmas Papar) dan 3 bulan di Puskesmas Satelit (Puskesmas Badas, Puskesmas Wonorejo, Puskesmas Ngadi, Puskesmas Kunjang). Program internsip ini bertujuan untuk pemahiran kompetensi dan peningkatan pengalaman bagi calon dokter sebelum mendapatkan STR (Surat Tanda Registrasi) yang dibimbing oleh seorang dokter pendamping di tiap wahana.

C. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 1 Sub Kegiatan yaitu : 1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 akan disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja program	Target 2023	Realisasi 2023	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan mutu kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama	pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan terlaksana	100%	100%	100,00%
		Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahun	60	197	328,33%

Uraian capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Tahun 2023 telah dilaksanakan uji kompetensi bagi pejabat fungsional kesehatan, yang terdiri dari 8 jenis jabatan fungsional kesehatan, yang diikuti oleh 85 peserta tenaga kesehatan. Peserta berasal dari puskesmas dan rumah sakit di lingkungan Dinas Kesehatan Kediri. Dengan total presentasi kelulusan peserta sebesar 100%.
- b. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 pasal 203 disebutkan bahwa pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standart kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier. Pada ayat 3 disebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi. Pada ayat 4 disebutkan bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran (JPL) dalam 1 (satu) tahun.

Dalam hal ini Seksi Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Kesehatan yang sesuai tupoksinya meningkatkan kompetensi ASN di wilayah kerjanya, memberikan kesempatan untuk pengiriman ASN pelatihan pada Lembaga yang terakreditasi.

Jumlah Pelatihan yang diselenggarakan seksi SDM Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2020, 2021 dan 2023



Sumber : Data Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2021, 2022 dan 2023

c. Terpilihnya tenaga kesehatan teladan Puskesmas

Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan RI No. 658/Menkes/SK/IV/2005, tentang Pedoman Penilaian tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas yang mana bertujuan untuk meningkatkan motivasi, dedikasi dan loyalitas tenaga kesehatan Puskesmas untuk lebih meningkatkan prestasi kerjanya, meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan strata pertama melalui Puskesmas, meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan di dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya, meningkatnya minat tenaga kesehatan untuk bekerja di Puskesmas, timbulnya kompetisi yang sehat di antara tenaga kesehatan dalam upaya meningkatnya pelayanan

kesehatan strata pertama di Puskesmas maka diadakannya pemilihan tenaga kesehatan Puskesmas teladan yang terdiri dari kategori:

- Dokter Umum
- Dokter Gigi
- Perawat
- Bidan
- *Nutrisionist*
- Kesehatan Masyarakat
- Kesehatan Lingkungan
- Ahli Teknis Laboratorium Medis
- Kefarmasian

Pada tahun 2022 telah terpilih sebagai tenaga kesehatan teladan tingkat provinsi, yaitu:

- 1 dokter dari Puskesmas Gurah
- 1 perawat dari UOBK RSUD SLG Kabupaten Kediri

Sedangkan tahun 2023 telah terpilih 6 nakes teladan tingkat provinsi.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang:

- a. Terfasilitasinya pemberian izin praktik tenaga kesehatan yang telah memenuhi kompetensi
 - Melakukan supervisi terkait ijin praktik
 - Menertibkan pengisian SISDMK sebagai pusat data tenaga kesehatan di Kabupaten Kediri
- b. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga Kesehatan
Melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin kepada faskes Pemerintah terkait perizinan praktik tenaga kesehatan.
- c. Terlaksananya perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia Kesehatan
Melakukan koordinasi lebih intens kepada faskes Pemerintah terkait perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM.

- d. Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar
Mempertahankan capaian kinerja agar tenaga kesehatan yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri sesuai dengan standart ketenagaan minimal baik dari kuantitas maupun kualitasnya.
- e. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia Kesehatan
Apabila dapat menambah/mengganti wahana maka dapat dilakukan pemerataan wahana PIDI
- f. Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota
Melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan uji kompetensi dengan lebih matang, baik dari segi penganggaran, tim penguji maupun peserta uji kompetensi.
- g. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - Mendorong SDM untuk semangat mengembangkan kompetensinya
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas baik itu jumlah maupun keanekaragaman pelatihan/workshop/seminar sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi tenaga kesehatan.
- h. Terpilihnya tenaga kesehatan teladan Puskesmas
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemilihan tenaga kesehatan Puskesmas teladan baik dalam proses seleksi maupun pembinaannya.
 - Meningkatkan pagu anggaran pemilihan tenaga kesehatan Puskesmas teladan
 - Mempersiapkan dengan pembinaan terpadu minimal 1 tahun sebelumnya

3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Dalam program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman didukung oleh 5 kegiatan yaitu 1). Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, UMOT; 2) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga; 3) Penerbitan Sertifikat laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) anatar lain : jasa boga, rumah makan/restoran, dan depot air minum, 4) Pemeriksaan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan extra makanan jajanan; 5)Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

Masing masing kegiatan mempunyai sub kegiatan yang menjabarkan pelaksanaan program kegiatan.

Realisasi indikator kinerja program pada tahun 2023 akan disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja program	Target 2023	Realisasi 2023	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan mutu kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama	Prosentase pemberian rekomendasi apotek, TO, tk. Akles dan optikal, UMOT	75%	75%	100%
		Prosentase produk makanan minuman tertentu yang bersertifikat p-irt	75%	100%	133,33%

A. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, UMOT

Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, UMOT terdiri atas 1 Sub Kegiatan yaitu : Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

Realisasi indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 akan disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja program	Target 2023	Realisasi 2023	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan mutu kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama	Jumlah rekomendasi apotek, to, tk. Akles dan optikal, umot yang diterbitkan	20	80	400%
		Presentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dibina dan diawasi	30%	48%	160%
		Jumlah rekomendasi apotek, to, tk. Akles dan optikal, umot yang memenuhi persyaratan	20	80	400%
		Jumlah apotek, to, tk. Akles dan optikal, umot	48	48	100%

		yang di bina dan di awasi			
--	--	---------------------------	--	--	--

Uraian capain indikator di atas adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2023 jumlah rekomendasi apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, umot yang diterbitkan sebanyak 80 rekom karena sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pada tahun 2023 dilakukan pengawasan terhadap 48 apotek, toko obat, dan U MOT.

B. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga terdiri atas 1 Sub Kegiatan yaitu Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Realisasi indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 akan disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja program	Target 2023	Realisasi 2023	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan mutu kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama	Jumlah sertifikat p-irt yang diterbitkan	126	16	12,69%
		Jumlah produsen industri rumah tangga yang mengikuti	126	16	12,69%

		penyuluhan keamanan pangan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksinya			
--	--	--	--	--	--

Pada tahun 2023 sebanyak 16 produsen industri rumah tangga telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksinya sehingga sertifikat PIRT dapat diterbitkan.

C. Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga mempunyai 1 Sub Kegiatan yaitu Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan - Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan.

Berikut capaian indikator kinerja tahun 2023:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja program	Target 2023	Realisasi 2023	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan mutu kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama	Prosentase pemeriksaan produksi makanan minuman industri rumah tangga	3,77%	40%	1061%
		Persentase produsen industri rumah tangga yang dibina dan diawasi	100%	100%	100,00%

Pada tahun 2023 semua produsen industri rumah tangga dilakukan pembinaan dan pengawasan agar selalu terpantau kualitas produksinya.

4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan terdiri atas 3 Kegiatan yaitu : 1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; 2) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; 3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Masing masing kegiatan mempunyai sub kegiatan yang menjabarkan pelaksanaan program kegiatan.

Realisasi indikator kinerja program pada tahun 2023 akan disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja program	Target 2023	Realisasi 2023	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan mutu kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama	Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)	67%	59%	88,06%

Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga) target sebesar 67 % capaian hasil sebesar 88,06%.

1. Tidak tercapainya target UKBM mandiri dipengaruhi dari capain Poskestren Purnama Mandiri sebesar 47 % dengan capaian sebesar 35,48 %, tidak tercapainya target strata Poskestren disebabkan santri yang telah dilatih lulus pendidikan dan kurangnya regenerasi santri yang baru, petugas kurang kontinue dalam pembinaan ke pondok, metode penyampaian pesan kurang

menarik, sarana dan prasarana yang tersedia belum mencukupi serta kurangnya dukungan di lingkungan masyarakat pondok.

2. Serta capaian prosentase Saka Bhakti Husada (SBH) Purnama Mandiri capaian sebesar 20 % dengan realisasi sebesar 23,08 %, hal ini dipengaruhi dari minat remaja dalam hal kegiatan kepramukaan mulai berkurang, kurangnya pembinaan dan refreshing bagi adik pramuka, metode pembinaan perlu ada perubahan (inovasi) mengikuti remaja milenial, sarana dan prasarana yang tersedia belum mencukupi serta kurangnya dukungan di lingkungan institusi pendidikan.

A. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 1 Sub Kegiatan yaitu Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Capaian kinerja tahun 2023 disajikan dalam table berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja program	Target 2023	Realisasi 2023	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan mutu kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama	frekuensi kegiatan tim pokjanel tk. Kabupaten, kecamatan dan desa dalam satu tahun	2 kali dalam 1 tahun	2 kali dalam 1 tahun	100%
		jumlah lintas sektor/ organisasi masyarakat/ organisasi profesi/ dunia usaha yang bermitra dengan UKBM	2 MOU/PKS	0	0,00%

Uraian capaian indikator kinerja dari tabel di atas dijabarkan sebagai berikut :

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan kemitraan maka dibentuklah tim pokjanal tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Semua tim diharapkan selalu bersinergi dalam meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Upaya upaya yang dilakukan tahun 2023 diantaranya revitalisasi posyandu dalam rangka meningkatkan strata posyandu, workshop desa siaga aktif bagi penentu kebijakan di desa, revitalisasi poskesdes dalam rangka peningkatan strata strata desa siaga.

Workshop dan kemitraan ormas dengan UKBM, Wokrshop Saka Bhakti husada

B. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai 1 Sub Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.

Realisasi indikator kinerja program pada tahun 2023 akan disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja program	Target 2023	Realisasi 2023	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan mutu kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama	Jumlah media KIE yang digunakan dalam satu tahun	5 Media	5 Media	100%
		Jumlah tema KIE program prioritas yang dipromosikan melalui media	5 Tema	5 Tema	100%

Target jumlah media KIE yang digunakan dalam satu tahun sebanyak 5 media hasil yang diperoleh sebanyak 5 media, hasil capaian yang diperoleh 100 %

Target jumlah tema KIE program prioritas yang dipromosikan melalui media sebanyak 5 tema dengan realisasi sebanyak 5 tema, capaian hasil yang diperoleh 100 %

Tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain

- a. Pelaksanaan germas aktifitas fisik, pemeriksaan berkala, serta edukasi gizi seimbang di tingkat kabupaten kota
- b. Kampanye lokal dalam mendukung pelaksanaan germas penyediaan media cetak, media luar ruang dan media social
- c. Sosialisasi dan advokasi pengukuran kebugaran jasmani melalui aplikasi SIPGAR tingkat puskesmas
- d. Meningkatkan koordinasi lintas sector
- e. Peningkatan pengetahuan PHBS di institusi kegiatan
- f. Kampanye local dalam mendukung pelaksanaan germas
- g. Sosialisasi implementasi KPP bagi kader

C. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota memiliki 1 Sub Kegiatan yaitu Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat.

Realisasi indikator kinerja program pada tahun 2023 akan disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja program	Target 2023	Realisasi 2023	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan mutu kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang terakreditasi	Tingkat partisipasi kesehatan masyarakat skala desa	100%	100%	100,00%

	minimal utama				
		Cakupan promosi kesehatan tingkat desa	100%	100%	100,00%
		Cakupan kelompok kesehatan masyarakat yang dibina	100%	100%	100,00%
		Persentase Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	88%	96,18%	109,29%
		Persentase poskesdes purnama mandiri (PURI)	18%	21,51%	119,5%
		persentase poskestren purnama mandiri (PURI)	47%	35,48%	75,49%
		persentase saka Bhakti Husada (SBH) purnama Mandiri (PURI)	20%	23,08%	26,83%
		persentase desa-kelurahan siaga aktif	18%	37,20%	206,67%

Dari table di atas diketahui bahwa :

1. Target Tingkat partisipasi kesehatan masyarakat skala desa sebesar 100%, dengan hasil capaian 100 %.
2. Target cakupan promosi kesehatan tingkat desa sebesar 100 %, dengan hasil capaian 100 %
3. Target cakupan kelompok kesehatan masyarakat yang dibina sebesar 100%, dengan hasil capaian 100 %

4. Target prosentase Posyandu Purnama Mandiri sebesar 88 % dengan realisasi sebesar 96,18 %, hasil capaian kinerja yang diperoleh 109,29 %
5. Target prosentase Poskestren Purnama Mandiri sebesar 47 % dengan realisasi sebesar 35,48 %, hasil capaian kinerja yang diperoleh 75,49 %
6. Target prosentase Poskesdes Purnama Mandiri sebesar 18 % dengan realisasi sebesar 21,51 %, hasil capaian kinerja yang diperoleh 119,5%
7. Target prosentase Saka Bhakti Husada (SBH) Purnama Mandiri sebesar 20 % dengan realisasi sebesar 23,08 %, hasil capaian kinerja yang diperoleh 26,83 %
8. Target prosentase Desa Siaga aktif (Purnama Mandiri) sebesar 18 % dengan realisasi sebesar 37,20 %, hasil capaian kinerja yang diperoleh 206,67%

Upaya upaya yang dilakukan untuk meingkatkan capaian antara lain :

1. Meningkatkan monitoring pelaksanaan kegiatan UKBM di masyarakat
2. Pembinaan taman posyandu, desa siaga aktif, serta penyelenggaraan SBH di tingkat kwaran
3. Pelatihan komunikasi perubahan perilaku stunting bagi kader

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

Untuk melihat perbandingan realisasi kinerja dari tahun sebelumnya apakah ada perkembangan dan bagaimana progresnya dari Tahun 2022 ke Tahun 2023, akan disajikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			2022	2023	2022	2023
2.	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	1.Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	72%	74%	78,74%	96%
	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang	62%	64%	58,97%	92,31%

		terakreditasi minimal utama				
--	--	-----------------------------	--	--	--	--

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 78,74% menjadi 96%. Capaian ini sudah melebihi target yang ditetapkan (74%)

Komitmen Kepala Daerah yang besar terhadap sektor kesehatan di Kabupaten Kediri menjadi faktor pendukung yang utama kemudahan proses perjalanan program dan kegiatan yang telah ditargetkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

Dukungan Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin pembiayaan kesehatan masyarakat antara lain dengan penguatan regulasi dan penyediaan anggaran untuk pembayaran iuran dan bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Untuk pencapaian indikator persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 34 puskesmas dan 2 RSUD sudah terakreditasi paripurna.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Untuk membandingkan kinerja yang di capai pada tahun 2023 dengan target yang ada di renstra akan disajikan dalam tabel berikut ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
2.	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	74%	96%	129,72%
	Meningkatnya mutu pelayanan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama	64%	92,31%	144,23%

kesehatan masyarakat				
----------------------	--	--	--	--

D. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

Untuk menjalankan fungsinya dalam melakukan pelayanan kesehatan, bidang dan seksi di Dinas Kesehatan juga membutuhkan anggaran, untuk mengetahui anggaran yang disediakan selama tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	68.728.953.079,00	41,10%
	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan pemerintah yang terakreditasi minimal utama	98.487.079.119,00	58,90%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa presentase untuk mendukung sasaran strategis persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan mencapai 41,10% dari total belanja semua program teknis tahun 2023, sedangkan untuk mendukung sasaran strategis Presentase faslitas pelayanan pemerintah yang terakreditasi minimal utama saat ini mencapai 58,90% dari total belanja program teknis SKPD.

E. PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Dari alokasi anggaran per program yang ada sampai dengan tahun 2023, rata-rata sudah mencapai diatas 70% realisasinya, untuk lebih menggambarkan realisasi anggaran yang mendukung indikator kinerja kesehatan selama tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	74	96	129,72	68.728.953.079	64.553.122.359	93,92
2.	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama	64	92,31	144,23	98.487.079.119	73.437.856.466	74,57

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis sudah mencapai lebih 100% untuk persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan dan persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama. Untuk realisasai fisik penyerapan anggaran pada tahun 2023 untuk indikator persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan sudah mencapai 93,92% dari anggaran yang dialokasikan, sedangkan untuk penyerapan anggaran persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama sudah mencapai 74,57% dari pagu anggaran.

F. EFISIENSI PENYERAPAN ANGGARAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA

Untuk melihat bagaimana efisiensi anggaran jika dibandingkan dengan kinerja program dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian kinerja	% penyerapan anggaran	tingkat efisiensi
1	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	129,72	93,92	35,8
2	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan	144,23	74,57	69,66

pelayanan kesehatan masyarakat	pemerintah yang terakreditasi minimal utama
--------------------------------	---

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa efisiensi kinerja untuk indikator kinerja persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan sudah mencapai 35,8 yang berarti bahwa dengan serapan anggaran sebanyak 95,92% bisa mencapai capaian kinerja sebesar 129,72%. Sedangkan untuk presentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi minimal utama sudah mencapai efisiensi sebesar 69,66 yang artinya dengan serapan anggaran sebesar 74,57% sudah bisa mencapai kinerja sebesar 144,23%.

G. PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Sumber Daya Manusia		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kebutuhan (Renbut)	Ketersediaan	Capaian (%)
1.	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	74	96	129,72	1668	2600	155
2.	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama	624	92,31	144,23	1668	2600	155

H. EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM PENCAPAIAN KINERJA

Untuk melihat bagaimana efisiensi sumber daya jika dibandingkan dengan kinerja program dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian kinerja	% Capaian sumber daya	tingkat efisiensi
1	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	129,72	155	25,28

2.	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama	144,23	155	10,77
----	--	--	--------	-----	-------

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa efisiensi sumber daya manusia untuk indikator kinerja persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan sudah mencapai 25,28 yang berarti bahwa dengan sumber daya manusia sebanyak 155% bisa mencapai capaian kinerja sebesar 129,72%. Sedangkan untuk presentase fasilitas kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama sudah mencapai efisiensi sebesar 10,77 yang artinya dengan sumber daya manusia sebesar 155% sudah bisa mencapai kinerja sebesar 144,23%.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

A. KESIMPULAN

Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dapat disimpulkan bahwa keseluruhan sasaran pada umumnya telah tercapai dengan baik. Hal ini tergambar dari pengukuran kinerja yang dicapai pada Tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan adanya komitmen Dinas Kesehatan untuk mewujudkan apa yang menjadi target kinerja yang direncanakan dan ditetapkan. Secara ringkas, seluruh capaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan pada Tahun 2023 telah memberikan gambaran dan diambil menjadi masukan bagi Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, terutama realisasi kinerja 100%. Selain itu diupayakan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Sangat diharapkan adanya kerjasama lintas program dan lintas sektor, karena keberhasilan program dan kegiatan bidang kesehatan tidak dapat dilaksanakan sendiri tetapi membutuhkan kerja sama lintas program dan lintas sector. Beberapa rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dalam bentuk Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/ Kota Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, Kegiatan Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/ kota, pemenuhan UKP dan UKM ini sudah bagus kinerjanya, namun masih perlu untuk dilaksanakan semaksimal mungkin dengan pemenuhan sarana dan prasarana, mutu layanan sesuai standar, dan tenaga kesehatan yang sesuai standar kompetensi serta menjalin kerjasama lintas program dan lintas sector. Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan mutu layanan UKP dan UKM sesuai standar mutu dan sesuai harapan masyarakat.

- 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dilakukan dalam bentuk kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten /Kota, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota ini sudah bagus kinerjanya, namun masih perlu untuk dilaksanakan semaksimal mungkin agar mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai standard dan terpetakan dengan baik pada fasilitas kesehatan yang membutuhkan.

- 3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dalam kegiatan Penyedia Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar sudah baik capaian kinerjanya, tetap dipertahankan.

- 4 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dalam bentuk kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tetap dipertahankan.

5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dalam bentuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tetap dipertahankan.

Diharapkan dalam tahun-tahun berikutnya, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai bahan kegiatan untuk perbaikan dalam penyusunan Rencana Strategis sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dengan menetapkan upaya penanggulangan terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada tahun 2023 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kediri pada umumnya dan Dinas Kesehatan pada khususnya.

PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023

No.	Nama Penghargaan	Tahun Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala (Internasional/ Nasional/Provinsi)	Penerima	Ket.
1	SWASTI SABA PADA (KAB. Sehat)	2023	Kementerian Dalam Negeri	Nasional	Wakil Bupati	Kesling
2	Implementasi Anaku Sehat dan Cerdas " Early Childhood Care, Nutrition and Education" (ECCNE) awards untuk penurunan stunting	2023	SEAMEO RECFON dan BKKBN	Nasional	Team SEAMEO	Kesga
3	Universal Health Coverage	2023	BPJS Kesehatan	Nasional	Sekretaris Daerah	Primer
4	Mitra Bhakti Husada (K3 perkantoran)	2023	Kementerian Kesehatan	Nasional	Kadinkes	Kesling
5	SMK3 perkantoran	2023	Kemeterian Tenaga Kerja	Nasional	Kabid Kesmas	Kesling
6	akreditasi LABKES (PARIPURNA)	2023	kementrian kesehatan republik indonesia	Nasional	kepala UPT labkesda	Labkesda
7	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM MOJO	Primer
8	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM NGADI	Primer
9	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM SEMEN	Primer
10	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	NGADILUWIH	Primer
11	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM WONOREJO	Primer
12	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM KRAS	Primer
13	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM PELAS	Primer
14	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM SAMBI	Primer
15	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM BLABAK	Primer
16	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM WATES	Primer
17	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM SIDOMULYO/SILIR	Primer
18	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM NGANCAR	Primer
19	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM PLOSOKLATEN	Primer
20	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM PRANGGANG	Primer
21	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM GURAH	Primer
22	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM ADAN-ADAN	Primer
23	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM PUNCU	Primer
24	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM KEPUNG	Primer
25	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM KELING	Primer
26	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM SIDOREJO	Primer
27	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM PARE	Primer
28	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM BADAS	Primer
29	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM KUNJANG	Primer

No.	Nama Penghargaan	Tahun Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala (Internasional/Nasional/Provinsi)	Penerima	Ket.
30	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM PUHJARAK	Primer
31	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM PURWOASRI	Primer
32	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM SUMBERJO	Primer
33	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM PAGU	Primer
34	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM BANGSONGAN	Primer
35	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM KAYENKIDUL	Primer
36	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM GAMPENG	Primer
37	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM NGASEM	Primer
38	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM TIRON	Primer
39	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM GROGOL	Primer
40	Akreditasi Puskesmas	2023	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	PKM TAROKAN	Primer
41	Juara 2 Tenaga Kesehatan Teladan Profesi Apoteker Puskesmas Tingkat Provinsi Jawa Timur	2023	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Provinsi	DARIL RAHMATULLAH, S.Farm., Apt - Puskesmas Kunjang	SDMK
42	Kader Terbaik Kabupaten/Kota	2003	Kementrian kesehatan republik indonesia	Nasional	Fatihatu Diyana	Promkes
43	Kader Terbaik Kabupaten/Kota	2003	Kementrian kesehatan republik indonesia	Nasional	Sri Wahyuningsih	Promkes
44	Juara 3 Nasional Lomba Video Layanan Inspiratif (Inovasi Layanan) Fasilitas Kesehatan	2023	BPJS Kesehatan	Nasional	RSUD SLG	Promkes & Farmasi (Akrobat)
45	Top 7 Finalist of Central Sterilization Indonesia Hero Award 2023	2023	I-CSPA	Nasional	RSUD SLG	Unit CSSD

**PRESTASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2023**



Penghargaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Kabupaten Kediri Atas Komitmennya mencapai Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2023



Penghargaan SEAMEO REC FON dan BKKBN Kepada Kabupaten Kediri sebagai FINALIS dalam kegiatan penghargaan Implementasi Anaku Sehat dan cerdas "Early Childhood Care, Nutrition and Education" (ECCNE) awards untuk akselerasi Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten/ Kota di Indonesia



Penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI Kepada UPTD labkesda Kabupaten Kediri sebagai Pengakuan Bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan Telah memenuhi Standar Akreditasi dan dinyatakan LULUS PARIPURNA



Penghargaan Swasti Saba Padapa dari Kementerian Kesehatan RI Kepada Kabupaten Kediri atas Keberhasilan Dalam Menyelenggarakan Kabupaten/ Kota Sehat Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KESEHATAN

Jl. Pamenang Nomor 1-C Sukorejo, Ngasem, Kediri, Jawa Timur 64182
Telp. 0354-683756 Email: dinkes@kedirikab.go.id - Website: dinkes.kedirikab.go.id

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI - LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023

LAPORAN KINERJAINSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2023

KEDIRI
(BERBUDAYA)

